

**ANALISIS PENGARUH SISTEM PEMBAYARAN NON TUNAI
TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI INDONESIA DENGAN
INFLASI SEBAGAI VARIABEL INTERVENING DALAM PERSPEKTIF
EKONOMI ISLAM PERIODE 2009-2017**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-syarat
Guna Mendapatkan Gelar Sarjana S1**

Oleh

ISMAIL

NPM : 1551010206

Jurusan : Ekonomi Syariah



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
1440 H/2019 M**

**ANALISIS PENGARUH SISTEM PEMBAYARAN NON TUNAI
TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI INDONESIA DENGAN
INFLASI SEBAGAI VARIABEL INTERVENING DALAM PERSPEKTIF
EKONOMI ISLAM PERIODE 2009-2012**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-syarat
Guna Mendapatkan Gelar Sarjana S1**

Oleh

ISMAIL

NPM : 1551010206

Jurusan : Ekonomi Syariah

Pembimbing I : H. Supaijo, S.H., M.H

Pembimbing II : Liya Ermawati, M.Ak

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG

1440 H/2019 M

ABSTRAK

Seiring dengan perkembangan teknologi yang tumbuh pesat, transformasi sistem pembayaranpun juga semakin berkembang terutama dalam hal sistem pembayaran non tunai. Mengingat sistem pembayaran ini merupakan salah satu komponen penting dalam dunia perekonomian dan juga merupakan salah satu program kerja Bank Indonesia dalam meningkatkan sistem pembayaran non tunai untuk mencapai pertumbuhan perekonomian nasional yang lebih baik.

Berdasarkan latar belakang tersebut maka terdapat permasalahan dalam penelitian ini yaitu apakah jumlah kartu ATM /Debet dan kartu kredit beredar melalui inflasi sebagai variabel intervening berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. Sehingga penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh variabel jumlah ATM/ debet yang beredar dan jumlah kartu kredit yang beredar terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia melalui inflasi sebagai variabel intervening periode 2009 sampai 2017.

Penelitian ini menggunakan data kuantitatif dengan jenis data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh melalui website Bank Indonesia dan Badan Pusat Statistik. Analisis data yang digunakan adalah analisis jalur dan mengolah data menggunakan program PLS (Partial Least Square). Pengujian hipotesis yang dilakukan yaitu pengujian model struktural dan Evaluasi goodness of fit.

Berdasarkan hasil analisis dari model structural (inner model) diperoleh output nilai R Square model pertama yaitu sebesar 0,138 artinya kartu ATM/Debet (X1), Kartu kredit (X2) mampu menjelaskan Inflasi (Y) sebesar 13.8%, sisanya 86,2% dijelaskan oleh faktor lain diluar penelitian. Sedangkan R Square dari model kedua sebesar 0.068 artinya Inflasi (Y) mampu menjelaskan PDB (Z) sebesar 6,8% sisanya 93.2% dijelaskan oleh faktor lain diluar penelitian. Hasil kesimpulan penelitian ini menunjukkan bahwa jumlah ATM/debet yang beredar dan jumlah kartu kredit yang beredar melalui inflasi sebagai variabel intervening tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Kata Kunci : Sistem Pembayaran Non Tunai, Inflasi, Pertumbuhan Ekonomi



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Alamat : Jl. Letkol. H. Endro Suratmin, Sukarame, Bandar Lampung (0721) 703260

SURAT PERNYATAAN

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ISMAIL
NPM : 1551010206
Prodi : Ekonomi Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul "(ANALISIS PENGARUH SISTEM PEMBAYARAN NON TUNAI TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI INDONESIA DENGAN INFLASI SEBAGAI VARIABEL INTERVENING DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM)" adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusunan sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam footnote atau daftar pustaka. Apabila dilain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada pihak penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Bandar Lampung, 20 Juni 2019
Penyusun



ISMAIL
1551010206



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Alamat : Jl. Letkol. H. Endro Suratmin, Sukarame, Bandar Lampung (0721)703260

PERSETUJUAN

Judul Skripsi : **ANALISIS PENGARUH SISTEM PEMBAYARAN
NON TUNAI TERHADAP PERTUMBUHAN
EKONOMI INDONESIA DENGAN INFLASI
SEBAGAI VARIABEL INTERVENING DALAM
PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM PERIODE 2009-2017**

Nama Mahasiswa : **ISMAIL**
NPM : **1551010206**
Program Studi : **Ekonomi Syari'ah**
Fakultas : **Ekonomi dan Bisnis Islam**

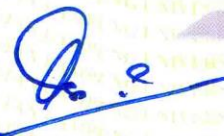
MENYETUJUI


Untuk dimunaqasahkan dan dipertahankan dalam sidang munaqasah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung.

Bandar Lampung, Juli 2019

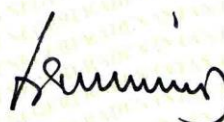
Pembimbing I

Pembimbing II


H. SUPAIJO, S.H., M.H.
NIP.196503121994031002


Liya Ermawati, S.E., M.S.Ak.
NIP.

Ketua Jurusan Ekonomi Syari'ah


Madnasir, S.E., M.S.I
NIP.197504242002121001



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Alamat : Jl. Letkol. H. Endro Suratmin, Sukarame, Bandar Lampung (0721)703260

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **ANALISIS PENGARUH SISTEM PEMBAYARAN NON TUNAI TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI INDONESIA DENGAN INFLASI SEBAGAI VARIABEL INTERVENING DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM PERIODE 2009-2017** disusun oleh **ISMAIL, NPM : 1551010206** Jurusan **Ekonomi Syariah**, telah diujikan dalam sidang munaqasah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung pada Hari/Tanggal : Rabu/ 26 Juni 2019.

TIM MUNAQASAH

Ketua Sidang : Madnasir, S.E., M.S.I

()

Sekretaris : Suhendar, S.E., M.S.Ak

(.....)

Penguji 1 : Femei Purnamasari, S.E., M.S.I

(.....)

Penguji 2 : H. Supaijo, S.H., M.H

()

Dekan

Dr. Moh. Bahrudin, M.Ag
NIP. 195808241989031003

MOTTO

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu, Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu (QS An Nisa: 29).



PERSEMBAHAN

Sebagai bukti dan hormat serta kasih sayang dari saya yang masih haus akan ilmu pengetahuan, saya persembahkan dan saya dedikasikan skripsi sebagai bentuk ungkapan rasa syukur dan terimakasih saya yang mendalam kepada

1. Kedua orang tua saya Ayahanda Sisno dan Ibunda Bibit, Do'a tulus dan terimakasih selalu kupersembahkan atas dukungan semangat, meteri, serta jasa, pengorbanan, mendidik dan membesarkanku dengan penuh kasih sayang serta senantiasa mendo'akan sehingga penulis dapat menyelesaikan pendidikan di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
2. Untuk keluarga besarku yang selalu memberikan dorongan moril maupun materil sehingga penulis bisa menyelesaikan pendidikannya
3. Sahabat-sahabatku yang tidak dapat disebutkan satu persatu, yang selama ini telah memberikanku motivasi
4. Teman-teman seangkatan (Ekonomi Syariah 2015) dan terkhusus saudara-saudaraku Ekonomi Syariah kelas C yang tidak akan saya lupakan, terimakasih untuk semuanya dan terimakasih untuk kebersamaan kita selama ini.
5. Teman-teman organisasi GENBI (Generasi Baru Indonesia), UKM-F RISEF, Tim Koperasi Febi Mart, dan kelompok Kuliah Kerja Nyata

6. Almamater tercintaku Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung yang telah mendidiku menjadi seseorang yang mampu berfikir lebih maju.



RIWAYAT HIDUP

Ismail di lahirkan di desa Labuhan Baru, kecamatan Way Serdang, Kabupaten Mesuji, pada tanggal 06 Januari 1996 sebagai putra kedua dari tiga bersaudara pasangan Bapak Sisno dan Ibu Bibit. Jenjang pendidikan penulis bermula dari:

1. Sekolah Dasar di SD Negeri (SDN) 01 Labuhan Baru, kecamatan Way Serdang, Kabupaten Mesuji lulus pada tahun 2009.
2. Melanjutkan pendidikan ke SMP MMT Labuhan Baru, kecamatan Way Serdang, Kabupaten Mesuji lulus pada tahun 2012
3. Lalu melanjutkan pendidikan di SMK Muhammadiyah Pancawarna kecamatan Way Serdang, Kabupaten Mesuji lulus pada tahun 2015
4. Pada tahun 2015 penulis terdaftar sebagai mahasiswa jurusan Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) UIN Raden Intan Lampung melalui seleksi tertulis. Pada tahun 2018 penulis berkesempatan memperoleh pengalaman sosial bermasyarakat dengan menjalankan Kuliah Kerja Nyata (KKN) tematik UIN Raden Intan Lampung di Desa Bumi Asih, Kecamatan Palas, Kabupaten Lampung Selatan.

Riwayat organisasi:

1. PJS ketua umum UKMF RISEF UIN Raden Intan Lampung periode 2017/2018

2. Ketua Umum GenBI (Generasi Baru Indonesia) komisariat UIN Raden Intan Lampung periode 2018/2019
3. Kepala divisi kaderisasi UKMF RISEF UIN Raden Intan Lampung periode 2018/2019
4. Kepala divisi Lingkungan Hidup GenBI (Generasi Baru Indonesia) provinsi Lampung periode 2019/2020
5. Anggota PMM (Persatuan Mahasiswa Mesuji) divisi Kerohanian periode 2018/2019



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan karunia-Nya yang selalu menyertai penulis dalam menyelesaikan proposal penelitian ini dengan judul “Analisis Pengaruh Sistem Pembayaran Non Tunai Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Dalam Perspektif Ekonomi Islam”.

Penelitian ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Tentunya dalam penulisan proposal ini masih terdapat banyak kekurangan, maka penulis dengan terbuka mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dari berbagai pihak guna untuk kebaikan dalam penulisan ini.

Dalam kesempatan ini, penulis juga tidak lupa mengucapkan terimakasih kepada berbagai pihak yang telah membantu dalam penyelesaian proposal penelitian ini, terutama kepada :

1. Kedua orang tua tercinta Bapak Sisno dan Ibu Bibit, atas doa dan dukungannya dalam berbagai hal baik berupa dukungan moril maupun materil dalam setiap langkah yang saya tempuh termasuk dalam penelitian ini.
2. Bapak Dr. Moh. Bahrudin, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

3. Bapak Madnasir, S.E., M.S.I., selaku Ketua Program Studi Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
4. Bapak H. Supaijo, S.H., M.H., dan Ibu Liya Ermawati, M.Ak., sebagai dosen pembimbing yang telah bersedia membimbing dan meluangkan waktunya dan memberi masukan dari awal sampai terselesaikannya penelitian ini.
5. Seluruh Dosen Pengajar dan Staf Administrasi di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
6. Kepada teman-teman Ekonomi Islam kelas C angkatan 2015, teman-teman pengurus dan anggota Generasi Baru Indonesia (GenBI), teman-teman pengurus maupun anggota UKMF Risef Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Serta kepada seluruh pihak lainnya yang telah banyak membantu dalam penyusunan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa proposal penelitian ini masih jauh dari kesempurnaan, baik dari segi bahasa maupun isinya, oleh karena itu penulis dengan senang hati akan menerima kritikan, saran dan masukan dari semua pihak. Semoga hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi pihak yang memerlukannya.

Bandar Lampung, Juli 2019

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
PERSETUJUAN	iii
PENGESAHAN	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN	vi
RIWAYAT HIDUP	viii
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Penegasan Judul	1
B. Alasan Memilih Judul	4
C. Latar Belakang Masalah.....	5
D. Batasan Masalah.....	13
E. Rumusan Masalah	13
F. Tujuan Penelitian	14
G. Manfaat Penelitian	14
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Kajian Teori	16
1. Sistem Pembayaran	16
a. Definisi sistem pembayaran	16
b. Jenis Sistem Pembayaran	17
2. Konsep Uang	19
a. Defenisi Uang.....	19
b. Jumlah Uang Beredar	20
c. Teori Uang	21
1) Teori Kuantitas Uang	21
2) Teori Keynesian	21
3) Teori Permintaan Uang	22
3. Teori Pertumbuhan Ekonomi	23
a. Teori Pertumbuhan Ekonomi Neo Klasik	23
b. Teori Pertumbuhan Baru (<i>New Growth Theory</i>).....	24
4. Sistem Pembayaran dan Kebijakan Moneter	24
5. Peranan Sistem Pembayaran Non Tunai Terhadap Perekonomian.....	26
6. Hubungan Sistem Pembayaran Non Tunai dengan Pertumbuhan Ekonomi.....	26
7. Inflasi.....	28
a. Pengertian inflasi.....	28
b. Penyebab terjadinya inflasi	29
c. Teori penyebab terjadinya inflasi.....	30
d. Indikator ekonomi makro untuk mengetahui laju inflasi	31
8. Hubugan Inflasi dengan Pertumbuhan Ekonomi	33

9. Inflasi dalam ekonomi syariah	36
10. Sistem pembayaran non tunai dalam perspektif ekonomi islam	43
a. Akad-akad pada uang elektronik.....	43
b. Prinsip Syariah Umum dalam Bidang Muamalah.....	49
B. Tinjauan Pustaka	56
C. Kerangka Pikir Penelitian	60
D. Hipotesis.....	61

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Waktu Penelitian	64
1. Jenis Penelitian.....	64
2. Tempat dan Waktu Penelitian	64
B. Sumber Data	
1. Jenis Data	64
2. Metode Pengumpulan Data.....	64
C. Populasi dan Sampel Batasan Operasional	65
D. Defenisi Operasional Variabel.....	66
1. Variabel Bebas	66
2. Variabel Terikat	67
3. Variabel Intervening.....	68
E. Uji Statistik.....	71
1. Analisis Jalur.....	71
2. Analisis Regresi Variabel Mediasi.....	72

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS DATA

A. HASIL PENELITIAN	
1. Gambaran Perekonomian Indonesia Tahun 2009-2017	76
2. Perkembangan Sistem Pembayaran Tahun 2009-2017.....	79
3. Peran Sistem Pembayaran dalam Perekonomian	82
4. Inflasi.....	84
B. ANALISIS DATA	
1. Hasil Analisa Jalur	86
2. Pembahasan.....	91

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan	102
B. Saran.....	104

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Sebelum menguraikan latar belakang masalah dalam skripsi ini, pada awal permulaan untuk mendapatkan gambaran yang jelas dan memudahkan dalam memahami skripsi ini, maka perlu adanya pembahsan yang menegaskan arti dan maksud dari beberapa istilah yang terkait dengan judul skripsi ini. Adapun judul skripsi ini adalah Analisis Pengaruh Sistem Pembayaran Non Tunai Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Dengan Inflasi Sebagai Variabel Intervening Dalam Perspektif Ekonomi Islam periode 2009-2017 yang akan saya uraikan istilah-istilah diatas sebagai berikut.

Analisis adalah penguraian suatu pokok atas berbagai bagiannya dan penelaahan atas bagian itu sendiri serta hubungan antar bagian untuk memperoleh pengertian yang tepat dan pemahaman arti keseluruhan.¹

Pengaruh adalah daya yang ada atau timbul dari sesuatu (orang, benda) yang ikut membentuk watak, kepercayaan, atau perbuatan seseorang, dalam hal ini sesuatu yang menjadi dasar konsumen dalam memilih suatu produk.²

Sistem pembayaran adalah suatu sistem yang mencakup seperangkat aturan, lembaga, dan mekanisme yang digunakan untuk melaksanakan pemindahan dana guna memenuhi suatu kewajiban yang timbul dari suatu kegiatan ekonomi.³ Perkembangan peran uang sebagai alat pembayaran terus mengalami perubahan wujud yaitu dalam suatu bentuk alat pembayaran cek

¹ Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Kedua, (Jakarta: Perum Balai Pustaka, 1995), hlm.32.

² Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa, (Jakarta: PT.Gramedia Pustaka Utama, edisi empat, 2004), hlm.1045

³ Bank Indonesia, 2004. *Peraturan Bank Indonesia Tentang Penyelenggaraan Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu*.

atau giral yang memungkinkan pembayaran dengan cara transfer dana dari saldo rekening antar institusi keuangan, khususnya bank. Pada dasarnya kita dapat menganggap cek atau giral sebagai jenis pertama alat pembayaran non tunai. Seiring dengan perkembangan teknologi, berbagai instrumen pembayaran non tunai atau elektronik mulai bermunculan dalam berbagai wujud antara lain phone banking, mobile banking, ATM, kartu debit, kartu kredit, smart card, dan sebagainya. Sejauh ini, seluruh pembayaran elektronik tersebut masih selalu terkait langsung dengan rekening nasabah bank yang menggunakannya. Dengan semakin majunya teknologi dan adanya kebutuhan akan alat pembayaran yang praktis dan murah, di beberapa negara telah mulai dikembangkan produk pembayaran elektronik yang dikenal sebagai uang elektronik (*e-money*), yang karakteristiknya berbeda dengan pembayaran elektronik yang telah disebutkan sebelumnya, karena setiap pembayaran yang dilakukan dengan menggunakan *e-money* tidak selalu memerlukan proses otorisasi dan online secara langsung dengan rekening nasabah di bank (pada saat melakukan pembayaran tidak dibebankan ke rekening nasabah di bank). *E-money* merupakan produk *stored value* dimana sejumlah nilai (*monetary value*) telah terekam dalam alat pembayaran yang digunakan (*prepaid*).

Pertumbuhan Ekonomi adalah suatu ukuran kuantitatif yang menggambarkan perkembangan suatu perekonomian dalam suatu tahun tertentu apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya.⁴

⁴ Sukirno, Sadono, *Ekonomi Pembangunan Edisi Kedua*. (Jakarta: PT Fajar Interpratama Mandiri, 2006), h. 9.

Inflasi adalah peningkatan tingkat harga keseluruhan. Inflasi terjadi ketika banyak harga naik secara serentak.⁵

Variabel Intervening adalah variabel yang secara teoritis mempengaruhi hubungan antara variabel independen dan dependen menjadi hubungan yang tidak langsung dan tidak dapat diamati dan diukur. Variabel ini merupakan variabel penyela/antara yang terletak di antara variabel independen dan dependen, sehingga variabel independen tidak langsung mempengaruhi berubahnya atau timbulnya variabel dependen.⁶

Ekonomi Islam adalah ilmu yang mempelajari usaha manusia untuk mengalokasikan dan mengelola sumber daya untuk mencapai falah berdasarkan pada prinsip-prinsip dan nilai-nilai Al-quran dan Sunnah.⁷

Berdasarkan penegasan dari istilah dalam judul diatas, maka yang dimaksud dalam judul penelitian ini adalah peneliti akan memfokuskan dan akan mengkaji tentang Analisis Pengaruh Sistem Pembayaran Non Tunai Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia dengan Inflasi Sebagai Variabel Intervening dalam Perspektif Ekonomi Islam periode 2009-2017.

B. Alasan Memilih Judul

Pada penulisan skripsi ini terdapat beberapa alasan yang kuat sehingga menarik untuk mengangkat beberapa permasalahan dalam judul tersebut, yaitu:

1. Alasan Objektif

⁵ Carl E Case dan Rey C Fair, *Prinsip-prinsip Ekonomi Jilid 2*, Diterjemahkan oleh Wibi Hardant (Jakarta : Erlangga, 2007), hlm.57.

⁶ Prof. Dr. Sugiyono, *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*. (Bandung: Alfabeta, 2016), h. 39

⁷ Stephen Rinaldy, *Ekonomi Islam/P3EI*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), hlm. 19

Secara objektif, sistem pembayaran non tunai berhubungan erat dengan transaksi yang dilakukan masyarakat dalam kegiatan ekonomi. Secara tidak langsung, sektor ini dapat mempresentasikan seberapa besar masyarakat dalam melakukan transaksi dan pengaruhnya terhadap pertumbuhan ekonomi. Sehingga bagi penulis pentingnya melakukan penelitian terhadap suatu masalah yang akan diteliti dalam judul skripsi tersebut.

2. Secara Subjektif

- a. Pokok bahasan skripsi ini sesuai dengan jurusan yang penulis ambil di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung
- b. Banyak referensi pendukung dari skripsi yang akan diteliti oleh penulis, baik yang bersumber dari artikel, jurnal-jurnal, maupun literatur yang diperlukan dalam penyusunan skripsi ini yang tersedia dipustaka. Sehingga akan mempermudah penulis untuk menyelesaikan skripsi ini kedepannya.

C. Latar Belakang Masalah

Seiring dengan semakin pesatnya penggunaan alat pembayaran non-tunai, baik yang berbasis kartu (seperti ATM, kartu kredit, dan kartu debit, baik yang terkait dengan rekening atau pun tidak) maupun pembayaran non-tunai melalui

kliring dan Real Time Gross Settlement (RTGS), terjadi peningkatan transaksi dan kegiatan ekonomi. Sementara itu di sisi lain peningkatan kegiatan ekonomi menstimulasi peningkatan kebutuhan alat-alat pembayaran non-tunai tersebut⁸. Semakin meningkatnya pembayaran non-tunai mengisyaratkan bahwa jenis pembayaran ini lebih disukai masyarakat daripada pembayaran tunai, yang antara lain disebabkan rendahnya biaya transaksi, minimnya tenaga dan waktu yang dibutuhkan, dan tiadanya kendala waktu dan tempat untuk bertransaksi. Peningkatan pembayaran non-tunai ini antara lain didorong oleh perkembangan teknologi informasi dan telekomunikasi. Diperkirakan volume dan nilai transaksi pembayaran non-tunai akan terus meningkat, seiring dengan meningkatnya perkembangan dan penggunaan teknologi dan tumbuhnya perekonomian.

Perkembangan sistem pembayaran didorong juga oleh semakin besarnya volume transaksi yang dilakukan oleh masyarakat, peningkatan resiko, kompleksitas transaksi, dan perkembangan teknologi itu sendiri. Sistem pembayaran tunai ini berkembang dari *commodity money* sampai *fiat money*, sedangkan sistem pembayaran non tunai berkembang dari yang berbasis warkat (cek, bilyet giro, nota debit dan sebagainya) sampai kepada yang berbasis elektronik (kartu elektronik maupun *electronic money*). Mengingat sistem pembayaran ini merupakan salah satu komponen penting dalam dunia perekonomian, baik dari sektor perdagangan maupun transaksi-transaksi pembayaran yang terjadi di sektor-sektor lainnya. Sistem pembayaran dan pola

⁸ Ferry Syarifuddin, Ahmad Hidayat, Tarsidin, *Dampak Peningkatan Pembayaran Non-Tunai Terhadap Perekonomian Dan Implikasinya Terhadap Pengendalian Moneter Di Indonesia*, Buletin Ekonomi Moneter dan Perbankan, April 2009.

bertransaksi ekonomi terus mengalami perubahan. Kemajuan teknologi dalam sistem pembayaran menggeser peranan uang tunai (*currency*) sebagai alat pembayaran non tunai yang lebih efisien dan ekonomis.

Kartu elektronik ini dibuat dengan tujuan untuk kemudahan masyarakat dalam bertransaksi. Jika dulu sebelum munculnya sistem pembayaran elektronik, maka ketika bertransaksipun kita harus bertemu dengan pihak yang kita ajak untuk bertransaksi, setelah kemunculan *elektronic payment system* ini kita mampu menghemat biaya, maupun mendapatkan kepraktisan dan kemudahan dalam bertransaksi. Dalam hal ini perbankan berlomba-lomba dalam berinovasi dalam sistem pembayaran elektronik, yaitu diantaranya kartu debit, kartu ATM, kartu kredit, *smart card*, *e-money* dan lainnya. Kartu ATM dan kartu debit memiliki definisi yang hampir sama yaitu alat pembayaran dengan menggunakan kartu yang dapat digunakan untuk melakukan penarikan tunai dan atau pemindahan dana dimana kewajiban pemegang kartu dipenuhi seketika dengan mengurangi secara langsung simpanan pemegang kartu pada bank atau lembaga selain bank yang mendapat untuk menghimpun dana. Menurut Warjiyo peran sistem pembayaran non tunai akan semakin besar dan vital bagi perkembangan perekonomian suatu negara, khususnya dengan semakin dominannya peran sistem pembayaran bernilai besar dibandingkan sistem pembayaran bernilai kecil. Keamanan dan efisiensi sistem ini tidak hanya mendukung pihak yang dilayaninya secara langsung, tetapi juga sistem keuangan nasional secara keseluruhan.

Sejalan dengan hal itu, Bank Indonesia sejak tahun 2006 memiliki tema program kerja untuk meningkatkan sistem pembayaran non tunai dengan instrumen melalui pengembangan alat pembayaran dengan menggunakan kartu (APMK). Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk mengurangi uang kas yang beredar di masyarakat. Dan mendorong terciptanya sistem pembayaran yang aman, efisien dan dapat diandalkan oleh masyarakat, sehingga dapat membangun perekonomian nasional yang lebih baik. Serta mengurangi biaya percetakan uang yang beredar di masyarakat. Seiring dengan perkembangan sistem pembayaran non tunai dengan instrumen melalui alat pembayaran menggunakan kartu (APMK) yang semakin tumbuh pesat, peningkatan transaksi non tunai berbasis kartu (seperti ATM, kartu kredit, dan kartu debit) dapat merangsang kegiatan ekonomi bahkan dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di suatu daerah atau negara. Mengingat transaksi non tunai memiliki manfaat yang cukup praktis, efisien dan cukup aman ketika bertransaksi dalam jumlah yang cukup besar dan sejalan dengan tujuan Bank Sentral yang ingin mewujudkan *less cash society* (masyarakat non tunai) serta menggiatkan masyarakat untuk lebih bertransaksi secara non tunai, guna mengurangi tindakan penyuapan dan pencucian uang (*money loundring*). Selain itu semakin menjamurnya fasilitas ATM (*Automated Teller Machines*) yang disediakan oleh bank-bank umum ditempat yang mudah dijangkau oleh masyarakat hampir di seluruh Indonesia.

Hasil penelitian yang dilakukan Bank Indonesia memperlihatkan tingginya animo publik dan dunia usaha untuk memakai alat pembayaran non tunai. Alat

Pembayaran Menggunakan Kartu (APMK) di Indonesia, baik ATM, kartu kredit, maupun kartu ATM yang juga berfungsi sebagai kartu debit yang beredar terus meningkat jumlahnya. Hal ini dapat dilihat dari perkembangan jumlah alat pembayaran menggunakan kartu pada enam tahun terakhir pada tabel 1.1

Tabel 1.1

Data Perkembangan Jumlah Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu (APMK) Beredar, Produk Domestik Bruto / *Gross Domestic Product* Berdasarkan Harga Konstan, Dan Inflasi Di Indonesia Tahun 2009-2017

Tahun	Transaksi kartu Debet/ ATM	Transaksi Kartu Kredit	Inflasi	PDB (Milyar Rp)
2009	3,378,235	12,259,295	2,78	5.606.203
2010	2,766,085	13,574,673	6,96	6.436.270
2011	3,623,992	14,785,382	3,79	7.427.086
2012	4,533,187	14,817,168	4,30	8.615.704
2013	6,292,164	15,091,684	8,38	9.546.134
2014	7,189,917	16,043,347	8,36	10.569.705
2015	7,330,388	16,863,842	3,35	11.531.716
2016	8,361,351	17,406,327	3,02	12.406.809
2017	8,815,007	17,244,127	3,61	13.588.797

Dari data APMK diatas dapat diketahui bersama bahwa kecenderungan pemakaian sistem pembayaran non tunai semakin diminati oleh masyarakat, dapat dilihat dari volume transaksi dari tahun ke tahun yang semakin meningkat. Seperti tiga tahun terakhir yaitu pada tahun 2015 ketahun 2016,

nominal transaksi kartu debit/ATM dari 8,361,351 juta meningkat ditahun 2016 menjadi 6,200,437,636 juta, yang mengalami peningkatan volume transaksi sebesar 1,030,963 juta. Menunjukkan bahwa kecenderungan masyarakat untuk lebih bertransaksi secara non tunai. Kecenderungan arah perubahan sistem pembayaran tunai menuju non tunai elektronik juga terjadi di banyak negara. Beberapa di antaranya, adalah Jepang dan Eropa yang menggunakan sistem pembayaran elektronik Biaya yang harus dikeluarkan sebuah negara untuk membiayai sistem pembayaran dapat mencapai tiga persen dari GDP atau pendapatan nasionalnya. Sejak sistem pembayaran non tunai elektronik memerlukan biaya hanya sepertiga sampai setengah dari system pembayaran non tunai berbasis kertas (*paper based*) maka jelaslah bahwa biaya sosial dalam sistem pembayaran dapat dikurangi dengan mengimplementasikan sistem pembayaran elektronik.

Menurut Untoro et al menyatakan bahwa pergerakan yang terjadi dalam volume transaksinya dapat digunakan sebagai sinyal awal guna melihat perkembangan perekonomian. Pembayaran non tunai berdasarkan penelitian terdahulu berpengaruh positif yang artinya ketika pembayaran non tunai meningkat maka akan dapat mengurangi biaya transaksi, kegiatan pertukaran uang akan lebih cepat sehingga akan mempengaruhi produktivitas dan akhirnya berpengaruh terhadap output dan pertumbuhan ekonomi. Berkaitan dengan hal tersebut, terdapat salah satu bukti penelitian oleh Oyewole et al yang menggunakan variabel pembayaran non tunai antara lain adalah jumlah transaksi ATM dalam melihat pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi.

Hasilnya menyimpulkan bahwa hanya variabel transaksi ATM yang berkontribusi positif terhadap pertumbuhan ekonomi dan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara pembayaran elektronik dengan pertumbuhan ekonomi.

Dalam teori pertumbuhan endogen, peran investasi dalam modal fisik dan modal manusia turut menentukan pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Tabungan dan investasi dapat mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan.

Hasil survei berdasarkan data badan Pusat Statistik terkait data pertumbuhan ekonomi di Indonesia terus mengalami peningkatan. Hal ini dapat dilihat dari data pada lima tahun terakhir pada tabel 1.1.

Dari data pada tabel 1.1 diatas dapat kita ketahui bersama bahwa pertumbuhan ekonomi di Indonesia terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Kemudian data inflasi yang menunjukkan adanya perubahan yang signifikan. Dari pertumbuhan yang terjadi tersebut tentunya menjadi pertanyaan apakah sistem pembayaran non tunai menjadi salah satu faktor bertambahnya pertumbuhan ekonomi di Indonesia.

Topik ini menjadi semakin relevan seiring dengan perkembangan perekonomian Indonesia dewasa ini. Disamping memberikan berbagai kemudahan dalam bertransaksi, penggunaan alat pembayaran non tunai secara luas diduga memiliki implikasi pada berkurangnya permintaan terhadap uang yang diterbitkan Bank Indonesia yaitu *base money*, yang pada gilirannya dapat

mempengaruhi pelaksanaan tugas Bank Indonesia dalam melaksanakan kebijakan moneter, khususnya dalam pengendalian besaran moneter.

Prespektif islam tentang penggunaan transaksi non tunai memiliki syarat tertulis dan digunakan untuk tujuan yang jelas seperti yang dijelaskan dalam surah Al-Baqarah ayat 282;

وَأِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمْنَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فإِنَّهٗ ءِثْمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴿٢٨٢﴾

Artinya: “Dan jika kamu dalam perjalanan (dan bermu’amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barangsiapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya, dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.”⁹

Dari ayat tersebut dijelaskan bahwa salah satu bentuk utang piutang ialah menggunakan transaksi non tunai, dengan tidak ada saksi dan tidak tersedia fasilitas tulis menulis. Dengan demikian orang yang berpiutang hendaknya diberikan barang tanggungan atau pada era sekarang disebut dengan kartu

⁹ Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan terjemahnya, Jakarta, CV Al Hanan, h. 49

kredit apabila masing-masing pihak tidak saling percaya, sehingga transaksi masih bisa dilakukan.¹⁰

Begitu juga dalam kaidah fiqh yang menjelaskan bahwa “Pada dasarnya, segala bentuk muamalah diperbolehkan, kecuali ada dalil yang mengharamkannya atau meniadakan kebolehnya”.

Dengan kedua landasan tersebut dapat menjadi alasan yang cukup kuat bahwa transaksi secara non tunai dalam hukum ekonomi islam di perbolehkan. Hal itu merupakan isu menarik yang akan penulis angkat sebagai topik dalam penelitian ini, yaitu tentang **Analisis Pengaruh Sistem Pembayaran Non Tunai Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Dengan Inflasi Sebagai Variabel Intervening Dalam Perspektif Ekonomi Islam Periode 2009-2017.**

D. Batasan Masalah

Batasan masalah digunakan untuk mengarahkan penelitian agar tidak menyimpang dari tujuan penelitian serta menghindari kesimpangsiuran dalam membahas dan menganalisis pengaruh sistem pembayaran non tunai terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia dan inflasi sebagai variabel intervening dalam perspektif ekonomi islam. Variabel yang mewakili sistem pembayaran non tunai tersebut yaitu jumlah ATM / debit beredar, dan jumlah kartu kredit

¹⁰ Nelasari. R. P., & Cahyono, H. (2018). *Pengaruh Sistem Transaksi Non Tunai Terhadap Tingkat Konsumsi Masyarakat Di Surabaya*. Jurnal Ekonomi Islam, Vol. 1 No. 2, 2018, Hlm. 165-171.

beredar, dan variabel yang mewakili pertumbuhan ekonomi Indonesia adalah Produk Domestik Bruto berdasarkan harga konstan, Serta inflasi sebagai variabel intervening. Penelitian ini hanya dibatasi pada periode waktu tahun 2009 – 2017.

E. Rumusan Masalah

Berdasarkan Latar Belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apakah jumlah kartu ATM / debit beredar dengan inflasi sebagai variabel intervening berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia?
2. Apakah jumlah kartu kredit beredar dengan inflasi sebagai variabel intervening berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia?
3. Apakah sistem pembayaran non tunai berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia dengan inflasi sebagai variabel intervening?
4. Bagaimana perspektif ekonomi islam terhadap sistem pembayaran non tunai berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi?

F. Tujuan Penelitian

Sehubungan dengan judul penelitian serta bertolak pada rumusan masalah yang telah dikemukakan, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh jumlah ATM debit beredar terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia
2. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh jumlah kartu kredit beredar terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia.

3. Untuk mengetahui apakah sistem pembayaran non tunai berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia.

G. Manfaat Penelitian

Setelah penelitian ini dilaksanakan maka diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan pengetahuan yang lebih mendalam mengenai pengaruh penerapan sistem pembayaran non-tunai terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia dan sebagai bahan informasi dalam menambah literatur bagi pihak-pihak lain yang ingin mengadakan penelitian lebih lanjut mengenai pengaruh sistem pembayaran non tunai terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Serta dapat digunakan untuk mengukur tingkat kemampuan dan memperluas wawasan.

2. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan informasi penelitian lebih lanjut. Serta dapat menambah pengetahuan dan juga referensi lain bagi mahasiswa dan masyarakat yang membutuhkan.

3. Bagi Pengambil Kebijakan

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan memberi masukan kepada setiap pengambil kebijakan dalam melihat pengaruh penerapan

sistem pembayaran non-tunai terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia.



BAB II

LANDASAN TEORI

A. Kajian Teori

1. Sistem Pembayaran

a. Defenisi Sistem Pembayaran

Sistem pembayaran tidak dapat dipisahkan dari perkembangan uang yang diawali dari pembayaran secara tunai sampai kepada pembayaran elektronik yang bersifat non tunai¹¹. Sistem pembayaran menurut Pohan adalah “suatu sistem yang melakukan pengaturan kontrak, fasilitas pengoperasian dan mekanisme teknis yang digunakan untuk penyampaian, pengesahan, dan penerimaan instruksi pembayaran, serta pemenuhan kewajiban pembayaran yang dikumpulkan melalui pertukaran “nilai” antar perorangan, bank dan lembagalainnya baik domestik maupun antarnegara (*cross border*)”.

Sistem Pembayaran adalah suatu sistem yang mencakup pengaturan, kontrak/perjanjian, fasilitas operasional, dan mekanisme teknis yang digunakan untuk penyampaian, pengesahan, dan penerimaan intruksi pembayaran, serta pemenuhan kewajiban pembayaran melalui pertukaran nilai antar perorangan, bank, dan lembaga lainya baik domestic maupun antarnegara.¹² Sedangkan

¹¹ Solikin, Suseno, *Uang: Pengertian, Penciptaan, dan Perannya dalam Perekonomian*, Buku kebanksentralan No. 1, (Jakarta: Pusat Pendidikan dan Studi Kebanksentralan, Bank Indonesia, 2002), hlm. 112.

¹² Sri Mulyani Tri Subari, Ascarya, *Kebijakan sistem Pembayaran di Indonesia*, (Jakarta: Pusat Pendidikan dan Studi Kebanksentralan Bank Indonesia, 2003), hlm.2.

menurut Undang-undang Nomor 3 Tahun 2004 yang dulunya Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999, sistem pembayaran adalah suatu sistem yang mencakup seperangkat aturan, lembaga, dan mekanisme yang digunakan untuk melakukan pemindahan dana guna memenuhi suatu kewajiban yang timbul dari suatu kegiatan ekonomi. Jadi dapat disimpulkan bahwa sistem pembayaran adalah sistem atau metode yang digunakan untuk menciptakan transaksi yang lebih efisien dan dalam transaksi tersebut terdapat seperangkat aturan, lembaga, dan mekanisme pemindahan dana dari pihak satu ke pihak lain guna memenuhi kewajiban dalam suatu kegiatan perekonomian.

b. Jenis Sistem Pembayaran

Dalam praktiknya sehari-hari, ada dua jenis sistem pembayaran yaitu pembayaran tunai (*cash*) dan pembayaran nontunai (*non-cash*).

1) Sistem Pembayaran Tunai

Alat pembayaran yang biasa digunakan dalam pembayaran tunai adalah uang kertas dan uang logam. Uang kertas dan uang logam termasuk dalam uang kartal. Uang kartal masih berperan penting dalam kehidupan sehari-hari, khususnya dalam transaksi yang nilainya kecil.

2) Sistem Pembayaran Non Tunai

Jasa pembayaran non tunai yang dilakukan bank maupun lembaga selain bank baik proses pengiriman dana, penyelenggara kliring maupun system penyelesaian akhir (*settlement*) sudah tersedia dan dapat berlangsung di Indonesia. Transaksi pembayaran nontunai dengan nilai besar diselenggarakan Bank Indonesia melalui sistem BI-RTGS (*Real Time Gross Settlement*) dan sistem kliring.

Selanjutnya berkembang instrumen pembayaran yang berbasis kartu sejalan dengan perkembangan teknologi. Saat ini, instrument pembayaran berbasis kartu yang telah berkembang dengan berbagai variannya. Mulai dari kartu kredit, kartu ATM, kartu debit, dan berbagai macam jenis uang elektronik.

a) **Kartu ATM dan Debet**

Kartu ATM dan Debet adalah alat pembayaran menggunakan kartu yang dananya berasal dari rekening (*account*) nasabah. Jenis kartu yang masuk dalam kategori ini adalah kartu ATM, Kartu Debet atau perpaduan ATM dan Debet. Pada awal perkembangannya, jenis *Account Based Card*, yang banyak dipakai adalah murni kartu ATM. Ini karena tujuan awal teknologi ATM hanya sebagai pengganti fungsi teller untuk meningkatkan efisiensi overhead cost, seperti penyediaan kantor cabang baru dan penambahan penggunaan sumber daya manusia.

b) Kartu Kredit

Kartu kredit merupakan salah satu transaksi non-tunai yang dananya berasal dari perbankan. Jenis alat transaksi ini berkembang cukup pesat. Di Indonesia kartu kredit mulai berkembang sejak dekade 90-an. Kartu kredit umumnya dimiliki oleh kalangan menengah ke atas. Selain menawarkan keuntungan yang tinggi, segmen penggunaannya merupakan kalangan atas dimana eksposur risiko gagal bayar dianggap relatif kecil. Hal ini menarik minat banyak bank untuk masuk dalam industri kartu kredit tersebut.

2. Konsep Uang

a. Defenisi Uang

Pengertian uang secara luas adalah sesuatu yang dapat diterima secara umum sebagai alat pembayaran dalam suatu wilayah tertentu atau sebagai alat pembayaran utang atau sebagai alat untuk melakukan pembelian barang dan jasa¹³. Dengan kata lain, bahwa uang merupakan alat yang dapat digunakan dalam melakukan pertukaran baik barang maupun jasa. Dalam sudut pandang ekonom, uang (*money*) merupakan stok asset-aset yang digunakan untuk transaksi¹⁴.

¹³Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2015), hlm.13

¹⁴Pratama Rahardja, Mandala Manurung, *Pengantar Ilmu Ekonomi (Mikroekonomi & Makroekonomi)*, (Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 2008), hlm. 317

Uang diartikan sebagai alat tukar umum atau alat pengukur nilai benda/ kekayaan yang berfungsi untuk memudahkan penukaran benda-benda/barang-barang, jasa-jasa, pembayaran-pembayaran dan pinjam meminjam dalam hubungan ekonomi di dalam suatu negara atau antar negara-negara. Sesuatu barang dapat didefinisikan sebagai uang apabila memiliki tiga fungsi dari uang, yaitu alat pertukaran, satuan hitung, serta sebagai alat penyimpanan nilai.

b. Jumlah Uang Beredar

Uang beredar adalah akumulasi uang yang digunakan masyarakat, uang kartal serta uang giral. Kewajiban sistem moneter yang terdiri dari uang tunai (kartal dan logam) pada masyarakat, tidak termasuk uang yang berada dalam kas bank maupun kas negara, ditambah dengan uang dalam giro tabungan yang dapat diuangkan menggunakan cek atau uang giral merupakan uang dalam arti sempit yang digunakan untuk transaksi dan berjaga-jaga, sedangkan kewajiban yang meliputi uang kartal uang giral dan uang kuasi adalah uang dalam arti luas yang menjadi perluasan dari atau uang yang digunakan untuk spekulasi.

c. Teori Uang

1) Teori Kuantitas Uang

Teori kuantitas uang membawa pengkajian yang lebih proporsional terhadap konsep permintaan uang dan dikembangkan dengan dua pendekatan, yaitu pendekatan oleh Irving Fisher (ekonom Universitas

Yale), serta pendekatan Cambridge (cash balance approach) yang dikembangkan oleh A. C. Pigou Fisher menemukan konsep velocity of money, tingkat kecepatan perputaran uang, yang menghubungkan kuantitas uang dengan total barang dan jasa yang dibelanjakan.

2) Teori Keynesian

Menurut Keynes memformulasikan ada tiga motivasi orang memegang uang, yaitu motif transaksi, motif berjaga-jaga, serta motif berspekulasi¹⁵. Adapun penjelasan ketiga motif tersebut ialah sebagai berikut:

1. Motif transaksi, sama dengan teori kuantitas uang, Keynes dalam hal ini berpendapat bahwa uang merupakan alat pertukaran dan *money demand* dipengaruhi oleh tingkat pendapatan masyarakat. Sebab, dia meyakini transaksi ditingkat individu dan juga tingkat masyarakat berhubungan dengan tingkat pendapatan masyarakat.
2. Motif berjaga-jaga. Keynes berpendapat bahwa masyarakat akan memegang uang untuk kebutuhan yang tidak bisa diekspektasi sebelumnya (untuk berjaga-jaga). Uang dalam hal ini tetap berfungsi netral sebagai alat pertukaran dan dipengaruhi oleh tingkat pendapatan masyarakat.

¹⁵ *Ibid*, hlm.321

3. Motif spekulasi (*Liquidity Preference*). Keynes mempertegas teori Cambridge, bahwa ketidakmenentuan dimasa datang mempengaruhi masyarakat untuk meminta uang. Uang bersifat sebagai penyimpan kekayaan, dan masyarakat kadang kala akan menggunakan uang untuk kepentingan spekulasi. Motivasi menyimpan uang untuk memperoleh keuntungan disebut sebagai motivasi spekulasi.¹⁶

3) Teori Permintaan Uang

Teori-teori permintaan uang secara garis besar menjelaskan faktor-faktor apa saja yang dipengaruhi sifat individu dalam menentukan jumlah permintaan uangnya dan preferensi individu dalam menyimpan bentuk kekayaan yang dimiliki. Fungsi permintaan uang masyarakat juga merupakan faktor yang menghubungkan sektor moneter dan sektor riil. Oleh karena itu perilaku permintaan uang masyarakat, terkait dengan semakin meningkatnya penggunaan media pembayaran non-tunai, sangat penting dicermati. Salah satunya adalah teori Baumol dan Tobin, dengan *Inventory Model*-nya, menyebutkan bahwa ada dua hal yang dipertimbangkan dalam pilihan untuk memegang uang atau aset, yakni: *transaction cost* yang harus dikeluarkan ketika memilih untuk memegang asset karena dengan memegang asset berkurang

¹⁶ *Ibid*, hlm. 322

liquidity-nya serta adanya *return* yang diperoleh dengan memegang aset.

3. Teori Pertumbuhan Ekonomi

a. Teori Pertumbuhan Ekonomi Neo Klasik

Menurut teori pertumbuhan Neo Klasik, permintaan masyarakat tidak menentukan laju pertumbuhan. Sebaliknya, menurut teori tersebut pertumbuhan ekonomi tergantung kepada pertambahan penalaran factor-faktor produksi dan tingkat kemajuan teknologi. Pandangan ini didasarkan kepada anggapan yang telah menjadi dasar dalam analisis klasik, yaitu perekonomian akan tetap mengalami tingkat kesempatan kerja penuh dan kapasitas barang-barang modal akan tetap sepenuhnya digunakan dari masa kemasa. Dengan demikian menurut teori Neo-klasik, sampai dimana perekonomian akan berkembang, tergantung kepada pertambahan factor-faktor produksi dan tingkat kemajuan teknologi.¹⁷

b. Teori Pertumbuhan Baru (*New Growth Theory*)

Teori ini memberikan kerangka teoritis untuk menganalisis pertumbuhan yang bersifat endogen, Pertumbuhan ekonomi merupakan hasil dari dalam sistem ekonomi. Teori ini menganggap bahwa pertumbuhan ekonomi lebih ditentukan oleh sistem produksi,

¹⁷ Sadono Sukirno, *Ekonomi Pembangunan*, (Jakarta : Kencana, 2006), hlm. 264

bukan berasal dari luar sistem. Kemajuan teknologi merupakan hal yang endogen, pertumbuhan merupakan bagian dari keputusan pelaku-pelaku ekonomi untuk berinvestasi dalam pengetahuan. Peran modal lebih besar dari sekedar bagian dari pendapatan apabila modal yang tumbuh bukan hanya modal fisik saja tapi menyangkut modal manusia.

Akumulasi modal merupakan sumber utama pertumbuhan ekonomi. Definisi modal/kapital diperluas dengan memasukkan model ilmu pengetahuan dan modal sumber daya manusia. Perubahan teknologi bukan sesuatu yang berasal dari luar model atau eksogen tapi teknologi merupakan bagian dari proses pertumbuhan ekonomi.

4. Sistem Pembayaran dan Kebijakan Moneter

Awalnya sistem pembayaran dianggap tidak punya keterkaitan dengan hal lain sehingga kerap diabaikan. Akan tetapi sejalan dengan berjalannya waktu, kian disadari betapa sistem pembayaran mempunyai peran instrumental sebagai infrastruktur pendukung pengendalian moneter. Penyelenggaraan sistem pembayaran mempunyai keterkaitan yang sangat erat baik dengan aktivitas perbankan maupun dengan stabilitas moneter. Oleh karena itu pembuatan arsitektur sistem pembayaran perlu disinergikan dengan kepentingan untuk senantiasa meningkatkan pelayanan jasa perbankan dan upaya menjaga stabilitas moneter. Adanya keterkaitan yang sangat erat ini melatarbelakangi pemikiran mengapa fungsi penyelenggaraan dan pengawasan sistem pembayaran di masukkan

sebagai salah satu fungsi pokok bank Indonesia, selain di bidang moneter dan pengawasan bank. Ketiga fungsi bank sentral tersebut merupakan pilar-pilar utama untuk menjamin terciptanya stabilitas keuangan dalam perekonomian.

Keterkaitan langsung antara sistem pembayaran dan pengendalian kebijakan moneter adalah karena pelaksanaan sistem pembayaran dapat berpengaruh terhadap penggunaan uang di masyarakat. Transaksi pembayaran di antara pelaku ekonomi modern sering kali menggunakan dana di rekening bank. Hasil dari proses kliring dan settlement, yaitu rekening satu pihak bertambah atas beban rekening pihak lain. Dengan demikian, sistem pembayaran adalah penghubung aktivitas ekonomi dan uang. Efisiensi penggunaan uang sangat tergantung dari efisiensi sistem pembayaran. Sebagai contoh, time lag yang terjadi antara intruksi di lakukan dan penyelesaian pembayaran sangat bervariasi, dan berpengaruh terhadap saldo rekening di bank serta kemampuan pelaku untuk melakukan transaksi lainnya. Pengaruh saldo rekening akibat dari time lag di kenal sebagai float, yang merupakan faktor penting dalam keseimbangan money supply dan demand. Pengembangan sistem pembayaran senantiasa di arahkan untuk terselenggara nya suatu sistem pembayaran yang efisien, cepat, dan aman. Hal ini bukan hanya sangat penting bagi pelayanan jasa perbankan untuk memenuhi tuntutan pengguna jasa perbankan yang semakin dinamis tetapi juga sangat penting dalam menunjang sistem pengaturan dan pengawasan bank serta bagi

implementasi kebijakan moneter yang efektif dan efisien. Sistem pembayaran yang efisien, cepat dan aman merupakan tulang punggung tercapainya suatu operasi moneter yang efektif dan efisien.

5. Peranan Sistem Pembayaran Non Tunai terhadap Perekonomian

Peningkatan sistem pembayaran non tunai berpotensi untuk dapat memberikan manfaat atau meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui beberapa cara yakni: mengurangi *opportunity cost* masyarakat, meningkatkan pendapatan masyarakat melalui pendapatan bunga dan *fee base income* dan pembiayaan tanpa bunga (khusus kartu prabayar/*e-money*) yang diterima Bank atau penerbit APMK, mendorong kenaikan tingkat konsumsi dan *velocity of money* serta mendorong aktivitas sektor riil dan pertumbuhan ekonomi (BI, 2006).

6. Hubungan Sistem Pembayaran Non Tunai dengan Pertumbuhan Ekonomi

Menurut Untoro, pergerakan yang terjadi dalam *volume* sistem pembayaran non tunai dapat digunakan sebagai sinyal awal guna melihat perkembangan perekonomian.

Pembayaran non tunai berdasarkan penelitian terdahulu berpengaruh positif yang artinya ketika pembayaran non tunai meningkat maka akan dapat mengurangi biaya transaksi, kegiatan pertukaran uang akan lebih

cepat sehingga akan mempengaruhi produktivitas dan akhirnya berpengaruh terhadap output dan pertumbuhan ekonomi. Inovasi dan gencarnya pemakaian alat pembayaran non tunai seperti kartu pra bayar, debit, kartu kredit dan lainnya dapat menimbulkan komplikasi terhadap pemakaian target kuantitas dalam pengendalian moneter. Apalagi kecenderungan saat ini alat pembayaran non tunai dengan memakai kartu mulai menggeser peranan alat pembayaran tunai dalam transaksi perekonomian nasional. Perkembangan jumlah uang beredar mencerminkan atau seiring dengan perkembangan ekonomi. Biasanya bila perekonomian bertumbuh dan berkembang, jumlah uang beredar juga bertambah, sedang komposisinya berubah atau berpengaruh negatif. Bila perekonomian makin maju, porsi penggunaan uang kartal makin sedikit, digantikan uang giral. Biasanya juga bila perekonomian makin meningkat, komposisi M1 dalam peredaran uang semakin kecil, sebab porsi uang kuasi makin besar.

Hasil riset yang dilakukan oleh Bambang Pramono dalam *working paper* bertajuk “Dampak Pembayaran Non Tunai Terhadap Perekonomian dan Kebijakan Moneter” mengemukakan bahwa kehadiran alat pembayaran non tunai bagi perekonomian nasional juga memberi manfaat terhadap peningkatan efisiensi dan produktivitas keuangan guna mendorong aktivitas sektor riil yang menghela pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat secara umum. Berkaitan dengan hal tersebut, terdapat salah satu bukti penelitian oleh Oyewole et al yang menggunakan

variabel pembayaran non tunai antara lain adalah jumlah transaksi ATM dalam melihat pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. Hasilnya menyimpulkan bahwa hanya variabel transaksi ATM yang berkontribusi positif terhadap pertumbuhan ekonomi dan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara pembayaran elektronik dengan pertumbuhan ekonomi. Pelaksanaan sistem pembayaran dapat berpengaruh terhadap penggunaan uang di masyarakat. Transaksi pembayaran di antara pelaku ekonomi modern seringkali menggunakan data di rekening bank. Dengan demikian, sistem pembayaran adalah penghubung aktivitas ekonomi dan uang.

7. Inflasi

a. Pengertian Inflasi

Inflasi adalah kecenderungan meningkatnya harga barang dan jasa secara umum dan terus menerus.¹⁸ Secara umum inflasi berarti kenaikan tingkat harga secara umum dari barang atau komoditas dan jasa selama suatu periode tertentu. Inflasi dapat dianggap sebagai fenomena moneter karena terjadinya kenaikan nilai unit perhitungan moneter terhadap suatu komoditas. Sebaliknya jika terjadi adalah

¹⁸ Rahardja Pratama, Mandala Manurung, *Teori Ekonomi Makro Suatu Pengantar Edisi Ketiga* (Jakarta: FEUI, 2004), hlm.359.

penurunan nilai unit perhitungannya terhadap barang atau komoditas dan jasa didefinisikan sebagai deflasi.¹⁹

Berdasarkan sifatnya inflasi dapat digolongkan menjadi beberapa golongan yaitu:

- 1) Inflasi ringan terjadi apabila kenaikan harga berada dibawah angka 10% setahun
- 2) Inflasi sedang berada diantara 10% - 30% setahun
- 3) Inflasi berat berada diantara 30% - 100% setahun
- 4) Hiperinflasi atau inflasi tak terkendali apabila lebih dari 100% setahun.

b. Penyebab terjadinya inflasi

- 1) Inflasi karena tarikan permintaan atau inflasi permintaan (*Demand Full Inflation*)

Inflasi ini merupakan inflasi yang disebabkan oleh besarnya permintaan masyarakat akan barang-barang. Permintaan total yang berlebihan biasanya dipicu oleh membanjirnya liquiditas dipasar sehingga terjadi permintaan yang tinggi memicu perubahan pada tingkat harga. Demand Full Inflation diakibatkan oleh perubahan-

¹⁹ Adimarwan A Karim, *Ekonomi Makro Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 135

perubahan yang terjadi pada sisi permintaan agragatif dari barang dan jasa pada suatu perekonomian.²⁰

2) Inflasi karena kenaikan biaya-biaya produksi (*Cost Push Inflation*)

Inflasi ini terjadi akibat adanya perubahan penawaran. Kelangkaan produksi dan atau juga termasuk adanya kelangkaan distribusi, walaupun permintaan secara umum tidak ada perubahan yang meningkat secara signifikan. Adanya ketidak lancarannya distribusi ini atau berkurangnya produksi yang tersedia dari rata-rata permintaan normal dapat memicu kenaikan harga sesuai dengan hukum permintaan-penawaran, atau juga karena terbentuknya posisi nilai keekonomian yang baru terhadap produk tersebut akibat pola atau skala distribusi yang baru.

Cost Pust Inflation adalah inflasi yang terjadi karena adanya perubahan pada sisi penawaran agragatif dari barang dan jasa pada suatu perekonomian.²¹

c. Teori Penyebab Terjadinya Inflasi

1. Teori Kuantitas

Teori ini menekankan pada peranan jumlah uang dan harapan masyarakat mengenai kenaikan harga terhadap timbulnya inflasi. Inti dari teori ini adalah inflasi hanya bias terjadi kalau ada

²⁰ *Ibid*, hlm. 139

²¹ Sadono Sukirno, *Makroekonomi Teori Pengantar Edisi Ketiga*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006), hlm. 333

penambahan volume uang beredar, baik uang kartal maupun uang giral. Laju inflasi juga ditentukan oleh laju pertumbuhan jumlah uang beredar dan oleh harapan masyarakat mengenai kenaikan harga dimasa mendatang.

2. Teori Keynes

Teori ini memiliki pandangan bahwa yang paling menentukan kestabilan kehidupan ekonomi nasional adalah permintaan masyarakat, hal ini terkait dengan produksi dan kapasitas produksi yang tersedia. Rendahnya kapasitas barang yang diproduksi berakibat harga barang menjadi naik, akibatnya timbul inflasi.

3. Teori Strukturalis

- a) Ketidak Elastisan Penerimaan Ekspor
- b) Ketidak Elastisan Penawaran atau Produksi Bahan Makanan di Dalam Negeri

d. Indikator Ekonomi Makro Untuk Mengetahui Laju Inflasi

a. Indeks Harga Konsumen

IHK adalah angka indek yang menunjukkan tingkat harga barang dan jasa yang harus dibeli konsumen dalam satu periode tertentu. Angka IHK dapat diperoleh dari menghitung harga-harga barang dan jasa utama yang di konsumsi oleh masyarakat.

b. Indeks Harga Perdagangan Besar

Jika IHK melihat inflasi dari sisi konsumen, maka IHPB sering disebut sebagai indeks harga produsen. IHPB menunjukkan tingkat harga yang diterima produsen pada berbagai tingkat produksi.

c. Indeks Harga Implisit

Kenaikan harga-harga yang tinggi secara terus menerus bukan saja menimbulkan efek buruk atas kegiatan ekonomi, tetapi juga pada kemakmuran individu dan masyarakat, diantaranya:²²

- 1) Inflasi akan menurunkan pendapatan riil orang-orang yang berpendapatan tetap
- 2) Inflasi akan mengurangi nilai kekayaan yang berbentuk uang
- 3) Memperburuk pembagian kekayaan

Bentuk kebijakan pemerintah perlu dilakukan secara serentak untuk meningkatkan keefektifannya. Bentuk masing-masing kebijakan pemerintah untuk mengatasi inflasi adalah sebagai berikut:

1. Kebijakan fiskal: menambah pajak dan mengurangi pengeluaran pemerintah
2. Kebijakan moneter: mengurangi, menaikkan suku bunga dan membatasi kredit

²² Sadono Sukirno, *Makroekonomi Teori Pengantar Edisi Ketiga*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006), hlm. 340

3. Dari segi penawaran: melakukan langkah-langkah yang dapat mengurangi biaya produksi dan menstabilkan harga seperti mengurangi pajak impor dan pajak atas bahan mentah, melakukan penetapan harga, dan melakukan perkembangan teknologi.

8. Hubungan Inflasi dengan Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi suatu negara ditandai dan diukur dengan tingkat Produk Domestik Bruto dan keseluruhan performa ekonomi suatu negara dilihat dari tingkat pertumbuhan ekonomi. BPS mengatakan bahwa PDB pada dasarnya merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu negara tertentu atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi.

Teori-teori yang menggambarkan hubungan (relationship) antara inflasi dan pertumbuhan ekonomi adalah sebagai berikut:

1. Teori Pertumbuhan Klasik (Classical Theories)

Teori Pertumbuhan Klasik ini diperkenalkan oleh Adam Smith yang mengutamakan faktor sisi penawaran (supply side) dimana fungsi produksi sebagai acuannya.

2. Teori Keynes (Keynesian Theories)

Teori Keynes menjelaskan hubungan antara inflasi dan pertumbuhan ekonomi dimana keistimewaan teori ini adalah di dalam

jangka-pendek (short-run) kurva penawaran agrigat (AS) adalah positif. Kurva AS positif adalah harga naik dan outputjuga naik. Selanjutnya hubungan yang selanjutnya secara hipotesisnya kepada hubungan jangka panjang (long-run relationship) antara inflasi dan pertumbuhan ekonomi dengan dimana inflasi naik akan tetapi pertumbuhan ekonomi turun. Keadaan ini membenarkan pembuktian secara empiris dari beberapa penelitian yang berhubungan dengan hubungan antara inflasi dan pertumbuhan ekonomi bahwa inflasi yang tinggi menyebabkan pertumbuhan ekonomi turun.

3. Teori Uang dan Moneter (Money and Moneterism theories)

Teori Uang dan Moneter ini fokus ke dalam komponen sisi penawaran jangka-panjang (long-run supply side properties) dimana Quantity Theory of Money dan Neutrality of Money merupakan dua teori yang mendukung komponen sisi penawaran jangka-panjang ini. Dalam Quantity Theory of Money, Friedman menghubungkan inflasi dengan pertumbuhan ekonomi dengan menyamakan jumlah total uang yang dibelanjakan dengan jumlah total uang yang ada (money stock) di dalam ekonomi. Friedman mengusulkan bahwa inflasi yang terjadi diakibatkan oleh uang beredar (money supply) lebih besar efeknya daripada akibat pertumbuhan ekonomi (tingkat produksi). Friedman menyimpulkan bahwa dalam jangka panjang inflasi diakibatkan oleh jumlah pertumbuhan uang dan tidak dipengaruhi oleh pertumbuhan

ekonomi. Jika pertumbuhan uang beredar lebih tinggi dari tingkat pertumbuhan ekonomi maka inflasi terjadi.

4. Teori Neo-Klasikal (Neo-Classical Theories)

Salah satu model Neo-Klasik dulunya digambarkan oleh Solow dan Swan. Faktor utama mempengaruhi pertumbuhan jangka-panjang dalam teori ini adalah perubahan teknologi yang menggantikan investasi. Faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan jangka-panjang tersebut merupakan faktor eksogen (exogenous factors) termasuk faktor inflasi. Sementara Mundell salah satu yang pertama menerangkan mekanisme yang berhubungan dengan inflasi dan pertumbuhan ekonomi terpisah dari permintaan yang berlebihan (excess demand) terhadap komoditi. Mundell menegaskan bahwa inflasi atau ekspektasi inflasi mengurangi harta seseorang atau inflasi atau ekspektasi inflasi mengurangi bunga uang tersebut (pada saat dibelanjakan). Dengan demikian orang beralih menyimpan uang ke dalam bentuk aset yang mengandung bunga (interest bearing assets). Banyaknya simpanan menambah banyaknya akumulasi kapital dan mempercepat pertumbuhan ekonomi.

5. Teori Pertumbuhan Endogen (Endogenous Growth Theories)

Pertumbuhan ekonomi hanya bergantung kepada satu variabel yaitu keuntungan dari kapital tersebut (rate of return on capital). Karena inflasi ini menurunkan jumlah keuntungan (rate of return),

maka mengurangi akumulasi kapital (*capital accumulation*) dan akibatnya menurunkan pertumbuhan ekonomi. Teori ini mengatakan bahwa pertumbuhan ekonomi akan terus terjadi akibat dari jatuhnya keuntungan kapital tidak melebihi tingkat kritikalnya dan individu akan terus berinvestasi dan menambah kapital akumulasi yang seterusnya menaikkan pertumbuhan ekonomi. Teori Pertumbuhan Endogen ini dikembangkan dengan menegaskan bahwa pertumbuhan ekonomi juga dipengaruhi oleh *capital manusia (human capital)* dan kapital fisik (*physical capital*).²³

9. Inflasi Dalam Ekonomi Syariah

Dalam sistem ekonomi Islam inflasi bukan merupakan suatu masalah utama ekonomi secara agregat, karena mata uangnya stabil dengan digunakannya mata uang dinar dan dirham. Penurunan nilai masih mungkin terjadi, yaitu ketika nilai emas yang menopang nilai nominal dinar itu mengalami penurunan, diantaranya akibat ditemukannya emas dalam jumlah yang besar, tapi keadaan ini kecil sekali kemungkinannya. Menurut para ekonom Islam, inflasi berakibat sangat buruk bagi perekonomian karena: Menimbulkan gangguan terhadap fungsi uang, terutama terhadap fungsi tabungan, fungsi dari pembayaran dimuka, dan fungsi dari unit perhitungan. Melemahkan semangat menabung dan sikap terhadap menabung dari masyarakat. Meningkatkan kecenderungan

²³ Ismail Fahmi Lubis, *Analisis Hubungan Antara Inflasi Dan Pertumbuhan Ekonomi: Kasus Indonesia*, QE Journal, Vol.03 - No.01 – 41.

untuk berbelanja terutama untuk non-primer dan barang-barang mewah. Mengarahkan investasi pada hal-hal yang non-produktif, yaitu penumpukkan kekayaan seperti: tanah, bangunan, logam mulia, mata uang asing dengan mengorbankan investasi kearah produktif seperti: pertanian, peternakan, pertambangan, industrial, perdagangan, transportasi, jasa dan lainnya.²⁴

Taqiuddin Ahmad ibn al-Maqrizi (1364 M – 1441 M), menggolongkan inflasi dalam dua golongan yaitu:

a. *Natural Inflation*

Inflasi jenis ini diakibatkan oleh sebab-sebab alamiah, di mana orang tidak mempunyai kendali. Ibn al-Maqrizi mengatakan bahwa inflasi ini adalah inflasi yang diakibatkan oleh turunnya. Penawaran Agregatif atau naiknya permintaan agregatif. Maka *Natural Inflation* dapat diartikan sebagai: Gangguan terhadap jumlah barang dan jasa yang diproduksi dalam suatu perekonomian.

b. *Human Error Inflation*

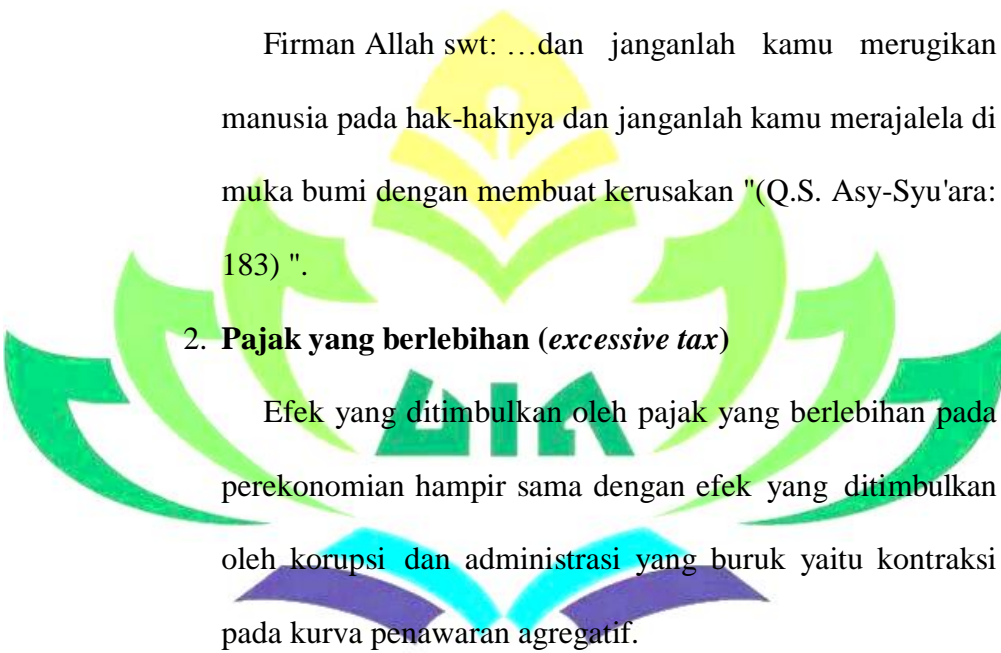
Human Error Inflation adalah inflasi yang diakibatkan oleh kesalahan dari manusia yang menyimpang atau melanggar dari aturan dan kaidah-kaidah syariah. Sebagaimana firman Allah swt yang artinya: “Telah nampak kerusakan di darat dan di laut

²⁴ Laa Maisyir, *Inflasi Dalam Perspektif Islam*, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam UIN Alauddin Makassar, Volume 3, Nomor 1, Juni 2016: 41-58

disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebahagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar)” (QS. Ar-Rum:41)

Human Error Inflation dalam sistem syariah dapat dikelompokkan menurut penyebab-penyebabnya sebagai berikut:²⁵

1. Korupsi dan administrasi yang buruk (*Corruption and bad Administration*).

Firman Allah swt: ...dan janganlah kamu merugikan manusia pada hak-haknya dan janganlah kamu merajalela di muka bumi dengan membuat kerusakan "(Q.S. Asy-Syu'ara: 183) ".

2. Pajak yang berlebihan (*excessive tax*)

Efek yang ditimbulkan oleh pajak yang berlebihan pada perekonomian hampir sama dengan efek yang ditimbulkan oleh korupsi dan administrasi yang buruk yaitu kontraksi pada kurva penawaran agregatif.

3. Pencetakan uang dengan maksud menarik keuntungan yang berlebihan (*excessive seignorage*).

²⁵ Laa Maisyir, *Inflasi Dalam Perspektif Islam*, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam UIN Alauddin Makassar, Volume 3, Nomor 1, Juni 2016: 41-58

Seignorage adalah keuntungan dari pencetakan koin yang didapat oleh percetakannya di mana biasanya percetakan tersebut dimiliki oleh pihak penguasa atau kerajaan. Ibn al-Maqrizi berpendapat bahwa uang sebaiknya dicetak hanya pada tingkat minimal yang dibutuhkan untuk bertransaksi (jual-beli) dan dalam pecahan yang mempunyai nilai nominal kecil.

4. Perilaku sogok-menyogok (*risywah*).

Sogok- menyogok akan menyebabkan biaya tinggi setiap transaksi, dimana biaya akan digeser ke tingkat harga sehingga harga barang dan jasa akan naik.

5. Penimbunan barang (*ihthikar*)

Penimbunan barang akan menyebabkan suplay barang ke pasar akan tersendak yang mendorong terjadinya kelangkaan. Kelangkaan barang akan mendorong permintaan yang tidak terkontrol sehingga akan mendorong tingkat harga.

6. *Emotional Market*

Permintaan yang tinggi terhadap barang dan jasa karena isu-isu, kegiatan keagamaan, atau terkait dengan budaya atau perilaku. Hal ini akan mendorong permintaan agregat

terhadap barang dan jasa sehingga mendorong kenaikan harga.

Inflasi secara umum disebabkan oleh dua hal, yaitu tarikan permintaan (kelebihan likuiditas alat tukar) dan yang kedua adalah desakan produksi dan termasuk kurangnya distribusi.

1. Inflasi Tarikan Permintaan (*Demand Pull Inflation*)

Inflasi tarikan permintaan terjadi akibat adanya permintaan total yang berlebihan dimana biasanya dipicu oleh membanjirnya likuiditas di pasar sehingga terjadi permintaan yang tinggi dan memicu perubahan pada tingkat harga. Bertambahnya volume likuiditas yang terkait dengan permintaan terhadap barang dan jasa mengakibatkan bertambahnya permintaan terhadap faktor-faktor produksi tersebut. Meningkatnya permintaan terhadap faktor produksi itu kemudian menyebabkan harga faktor produksi meningkat. Jadi inflasi ini terjadi karena suatu kenaikan dalam permintaan total sewaktu perekonomian yang bersangkutan dalam situasi *full employment* dimana biasanya lebih disebabkan oleh rangsangan volume likuiditas dipasar yang berlebihan. Membanjirnya likuiditas di pasar juga disebabkan oleh banyak faktor selain yang utama tentunya kemampuan bank sentral dalam mengatur peredaran jumlah uang, kebijakan suku bunga bank sentral, sampai dengan aksi spekulasi yang terjadi di sektor industri keuangan (*money market*)

2. Inflasi Desakan Biaya (*Cost Push Inflation*)

Inflasi terjadi akibat adanya kelangkaan produksi dan juga kelangkaan distribusi, walaupun permintaan secara umum tidak ada perubahan yang meningkat secara signifikan. Adanya ketidaklancaran aliran distribusi ini atau berkurangnya produksi yang tersedia dari rata-rata permintaan normal dapat memicu kenaikan harga sesuai dengan berlakunya hukum permintaan penawaran, atau juga karena terbentuknya posisi nilai perekonomian yang baru terhadap produk tersebut akibat pola atau skala distribusi yang baru. Berkurangnya produksi sendiri bisa terjadi akibat berbagai hal seperti adanya masalah teknis di sumber produksi, bencana alam, cuaca, atau kelangkaan bahan baku untuk menghasilkan produksi, aksi spekulasi (penimbunan), dll. Sehingga memicu kelangkaan produksi yang ada dipasaran. Begitu juga hal yang sama dapat terjadi pada distribusi, dimana dalam hal ini faktor infrastruktur memainkan peranan yang sangat penting untuk kelancaran distribusi.

Menurut Husain Shahathah, beberapa solusi untuk mengatasi inflasi: Reformasi terhadap sistem moneter dengan menghubungkan antara kuantitas uang dengan kuantitas produksi. Mengarahkan belanja dan melarang sikap berlebihan dan belanja yang tidak bermanfaat. Larangan menyimpan (menimbun) harta dan mendorong untuk menginvestasikannya. Meningkatkan produksi dengan memberikan dorongan kepada masyarakat secara materil dan moral. Menjaga pasokan barang kebutuhan pokok, Selain itu inflasi dapat dikendalikan dengan menerapkan prinsip-prinsip

syariah dalam pengelolaan moneter dan fiskal antara lain; Penggunaan mata uang yang stabil (dinar dan dirham), Menurunkan tingkat suku bunga (riba) atau zero intres, Meningkatkan daya serap uang pada kegiatan sektor riil dan investasi, Menghindari perdagangan spekulasi uang (maisyrir), Memaksimalkan perolehan zakat dan menjadikan zakat sebagai instrumen kebijakan fiskal.²⁶

Hal lain yang perlu dilakukan adalah memperbaiki tata kelola pemerintahan, kualitas moral pejabat dan perilaku masyarakat berupa: Membangun sistem pemerintahan dan pelayanan yang efektif dan efisien, perbaikan moral pejabat melalui pendidikan dan pelatihan, Memperbaiki pola konsumsi dan belanja masyarakat, Menghindari sifat boros.

10. Sistem Pembayaran Non Tunai dalam Perspektif Ekonomi Islam

a. Akad-Akad Pada Uang Elektronik

Lafal akad berasal dari bahasa arab yaitu al-‘aqd yang secara etimologi berarti perikatan, perjanjian, dan permufakatan²⁷. Secara terminologi, Akad Syariah adalah perjanjian atau kontrak tertulis antara para pihak yang memuat hak dan kewajiban masing-masing pihak yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah. Terdapat beberapa akad yang berhubungan dengan mekanisme uang elektronik. Diantaranya yaitu sebagai berikut:

²⁶ Laa Maisyir, *Inflasi Dalam Perspektif Islam*, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam UIN Alauddin Makassar, Volume 3, Nomor 1, Juni 2016: 41-58

²⁷ Azharuddin Lathif, *Kontrak Bisnis Syariah*, (Jakarta: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2011), h. 26

1. Akad Jual Beli (al-ba'y)

Akad jual beli adalah akad tukar menukar harta dengan harta lain melalui tata cara yang telah ditentukan oleh syariat. Dalam Fatwa DSN MUI NO: 82/DSN-MUI/VIII/2011, Akad jual beli juga didefinisikan sebagai pertukaran harta dengan harta yang menjadi sebab berpindahnya kepemilikan obyek jual beli. Akad jual beli dalam kegiatan uang elektronik terjadi ketika nilai uang elektronik (wahdat al-illiktruniyat) yang tersimpan dalam media penyimpanan, baik berupa server atau chip yang dimiliki oleh penerbit dijual kepada calon pemegang dengan sejumlah uang senilai uang yang tersimpan dalam media uang elektronik²⁸.

2. Akad Wadi'ah

Akad wadi'ah adalah akad yang berupa penitipan barang/harta kepada orang lain yang dapat dipercaya untuk memelihara dan menjaganya. Wadi'ah dalam uang elektronik terjadi ketika calon pemegang uang elektronik menyerahkan sejumlah uang kepada Penerbit dengan maksud menitipkan dan selanjutnya sejumlah uang tersebut dikonversikan menjadi sebuah nilai uang elektronik senilai uang yang diserahkan. Selanjutnya Penerbit wajib memelihara dan menjaga sejumlah uang tersebut dan menyerahkannya kepada pemegang saat diminta atau diambil atau untuk pembayaran kepada

²⁸ Kajian Bersama Uang Elektronik Ditinjau Dari Kesesuaian Prinsip-Prinsip Syariah, (Jakarta: Bank Indonesia dan Dewan Syariah Nasional, 2016), h. 61

pedagang (Merchant). Apabila menggunakan akad wadiah, maka harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- a. Bersifat titipan
- b. Titipan bisa diambil/ditarik/digunakan kapan saja
- c. Penerbit dapat menginvestasikan uang titipan dengan terlebih dahulu meminta izin kepada Pemegang
- d. Dalam hal uang titipan digunakan penerbit dan mengalami resiko kerugian, maka penerbit bertanggungjawab secara penuh
- e. Otoritas dapat menjamin atau tidak menjamin dana pemegang uang elektronik yang dititipkan di Penerbit

3. Akad Sharf

Secara bahasa sharf berarti tambahan, penukaran, penghindaran atau transaksi jual beli²⁹. Secara istilah, sharf adalah bentuk jual beli naqdain baik sejenis maupun tidak yaitu jual beli emas dengan emas, perak dengan perak, atau emas dengan perak dan baik telah berbentuk perhiasan maupun mata uang. Jadi sharf dalam istilah fiqh muamalah kontemporer adalah transaksi jual beli mata uang baik antar mata uang sejenis maupun antar mata uang berlainan jenis³⁰.

Dalam fatwa DSN-MUI nomor 28 tahun 2002 tentang akad sharf, hanya dihalalkan melalui mekanisme spot atau penyerahan uang

²⁹ Sutan Remy Sjahdiyani, *Perbankan Islam dan Kedudukannya dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia* (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 1999), h. 87

³⁰ Fatwa DSN-MUI No 28/DSN-MUI/III/2002 Tentang Jual Beli Mata Uang (Al-Sharf). h. 1

dengan uang dilakukan secara tunai, sedangkan mekanisme forward, swap dan option tidak diperbolehkan menurut syariah. Uang bukanlah obyek yang bisa diperdagangkan untuk dapat menghasilkan keuntungan. Oleh karena itu, jika uang dipertukarkan dengan uang pula yang merupakan bagian dari industri keuangan, maka perintah Islam dalam perdagangan barang ribawi diterapkan, yaitu harus dalam jumlah yang sama dan diserahkan pada saat itu juga.³¹

4. Akad Ijarah

Dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/46/PBI/2005, Tentang Akad Penghimpunan Dan Penyaluran Dana Bagi Bank Yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah Ijarah, akad ijarah adalah transaksi sewa menyewa atas suatu barang dan atau upah mengupah atas suatu jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa atau imbalan jasa. Menurut fatwa DSN MUI No: 09/DSNMUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan Ijarah, Akad ijarah yaitu akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang dalam waktu tertentu dengan pembayaran sewa (ujrah), tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri.

Pada konteks uang elektronik, Akad Ijarah digunakan dalam hal terdapat transaksi sewa menyewa atas perlengkapan/peralatan dan atau terdapat pelayanan jasa dalam penyelenggaraan uang elektronik. Akad

³¹ Mohd Noor Omar, dkk, "E-Money in Malaysia: Shariah and Economic Analysis", *Working Paper In Islamic Economic And Finance*, No. 1224 (Juli 2012), h.6.

ijarah juga dapat dipakai dalam pembayaran upah menyangkut biaya registrasi maupun kepesertaan merchant (pedagang) kepada penerbit, maupun biaya isi ulang uang elektronik di luar nominal pengisian saldo utama. Apabila menggunakan akad ijarah harus memenuhi ketentuan dalam fatwa sebagai berikut:

1. Obyek ijarah adalah manfaat dari penggunaan barang dan/atau jasa
2. Manfaat barang atau jasa harus bisa dinilai dan dapat dilaksanakan dalam kontrak.
3. Manfaat barang atau jasa harus yang bersifat dibolehkan (tidak diharamkan).
4. Manfaat harus dikenali secara spesifik sedemikian rupa untuk menghilangkan jahalah (ketidaktahuan) yang akan mengakibatkan sengketa.
5. Spesifikasi manfaat harus dinyatakan dengan jelas, termasuk jangka waktunya. Bisa juga dikenali dengan spesifikasi atau identifikasi fisik.
6. Sewa atau upah adalah sesuatu yang dijanjikan dan dibayar nasabah kepada LKS sebagai pembayaran manfaat. Sesuatu yang dapat dijadikan harga dalam jual beli dapat pula dijadikan sewa atau upah dalam Ijarah.

5. Akad Wakalah

Secara bahasa wakaalah adalah melindungi. Menurut ulama. Mazhab Syafi'i mengatakan bahwa wakaalah adalah penyerahan

kewenangan terhadap sesuatu yang boleh dilakukan sendiri dan bias diwakilkan kepada orang lain, untuk dilakukan oleh wakil tersebut selama pemilik kewenangan asli masih hidup³². Menurut Fatwa DSN MUI No. 10 tahun 2000, akad wakalah yaitu pelimpahan kekuasaan oleh suatu pihak kepada pihak lain dalam hal-hal yang boleh diwakili. Akad Wakalah digunakan dalam hal penerbit bekerjasama dengan pihak lain sebagai agen penerbit (Co-Branding) dan/atau terdapat bentuk perwakilan lain dalam transaksi uang elektronik. Akad wakalah juga diterapkan dalam pembayaran kepada merchant (pedagang) dimana penerbit dapat mewakili pemegang kartu dalam membayar transaksinya maupun sebaliknya tergantung pada jenis uang elektronik yang diterbitkan. Apabila menggunakan akad ini maka harus memenuhi ketentuan berikut:

- a. Ijab Qabul harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad) perwakilan ini
- b. Bersifat mengikat dan tidak dapat dibatalkan sepihak
- c. Orang yang mewakilkan (muwakkil) adalah pemilik sah dari sesuatu yang diwakilkan
- d. Muwakkil harus orang *mukallaf* atau anak *mumayyiz*

³² Mughnil Al-Muhtaj, Vol. II, H. 217, Dalam Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, penerjemah Abdul hayyie Al-Kaffaani dkk, (Jakarta: Gema Insani, 2011), Cet. X, Jilid 5, H. 590- 591

- e. Orang yang mewakili (*wakil*) harus cakap hukum, dapat mengerjakan tugasnya, dan amanah dalam bertugas
- f. Hal-hal yang diwakilkan harus diketahui dengan jelas oleh orang yang mewakili, tidak bertentangan dengan syariah Islam, dan dapat diwakilkan menurut syariah Islam.

6. Akad Qardh

Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI NO: 19/DSNMUI/IV/2001, Akad Qardh yakni suatu akad pinjaman kepada nasabah dengan ketentuan bahwa nasabah wajib mengembalikan dana yang diterimanya kepada LKS pada waktu yang telah disepakati oleh LKS dan nasabah. Akad Qardh dapat digunakan dalam hubungan hukum antara penerbit dengan memegang uang elektronik. Apabila menggunakan akad Qard, maka harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:

1. Bersifat hutang-piutang
2. Penerbit dapat menggunakan (menginvestasikan) uang hutang dari Pemegang Uang Elektronik
3. Penerbit dapat mengembalikan jumlah pokok piutang Pemegang Uang Elektronik kapan saja sesuai kesepakatan
4. Ototitas boleh membatasi penerbit dalam penggunaan dana hutang dalam pertimbangan masalah.

b. Prinsip Syariah Umum dalam Bidang Muamalah

Prinsip syariah pada dasarnya terbagi menjadi 2, yaitu kaidah prinsip syariah dalam bidang ibadah, maupun prinsip syariah dalam bidang muamalah. Prinsip syariah muamalah merupakan suatu prinsip hukum Islam dalam kegiatan muamalah (interaksi sesama manusia) yang didasari pada Al-Quran dan As-Sunnah. Menurut UU No 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah, prinsip syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah. Secara umum, prinsip syariah dalam bidang muamalah mengikuti kaidah fiqh berikut ini:

Kaidah fiqh ini memiliki arti *“Pada dasarnya dalam (segala) kegiatan muamalah (interaksi sesama manusia) adalah diperbolehkan kecuali terdapat dalil yang mengharamkannya”*.

Dalam kegiatan muamalah dalam konteks ekonomi, terdapat larangan-larangan yang terdapat dalam Al-Quran dan Hadits yang membatasi kegiatan ekonomi. Semua yang terlarang dalam Al-Quran dan Hadits semata-mata untuk melindungi manusia dari hal-hal yang merugikan. Suatu perilaku individu muslim dalam setiap aktivitas ekonomi syariahnya harus sesuai dengan tuntutan syariat Islam dalam

rangka mewujudkan dan menjaga maqashid syariah (agama, jiwa, akal, nasab dan harta)³³.

Penulis melakukan pembatasan bahasan agar tidak terlalu umum dan lebih fokus. Transaksi pada kegiatan muamalah dikatakan halal setidaknya jika tidak memiliki unsur-unsur sebagai berikut:

1. Maysir (Judi)

Maysir atau qimar secara harfiah bermakna judi. Secara teknis adalah setiap permainan yang didalamnya disyaratkan adanya sesuatu (berupa materi) yang diambil dari pihak yang kalah untuk pihak yang menang³⁴. Dalam peraturan bank Indonesia No 7/46/PBI/2005, maysir adalah transaksi yang mengandung perjudian, untung-untungan atau spekulatif yang tinggi. Untuk bisa dikategorikan sebagai judi harus ada 3 unsur yang dipenuhi:

- a. Adanya taruhan harta atau materi yang berasal dari kedua pihak yang berjudi.
- b. Adanya suatu permainan yang digunakan untuk menentukan pemenang dan yang kalah.
- c. Pihak yang menang mengambil harta (sebagian atau seluruhnya) yang menjadi taruhan, sedangkan pihak yang kalah kehilangan hartanya.

³³ Nur Rianto Al Arif & Euis Amalia, *Teori Mikroekonomi: Suatu Perbandingan Ekonomi Islam Dan Ekonomi Konvensional* (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2014), h. 43

³⁴ Nur Rianto Al Arif, *Dasar-Dasar Ekonomi Islam*, (Solo: Era Adicitra Intermedia, 2011), h. 108

Dalam konteks ekonomi, maysir atau judi juga berarti spekulasi, maupun untung-untungan. Dalam Al-Quran larangan Maysir (judi) terdapat pada Surah Al-Maidah ayat 90:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ
عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٩٠﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan” (QS. Al-Maidah; 90).³⁵

2. Riba

Riba secara bahasa berarti tambahan (*ziyadah*). Dalam istilah syara *riba* didefinisikan sebagai tambahan pada barang-barang tertentu³⁶. *Riba* diharamkan dalam Al-Quran, hadits maupun Ijma. Di zaman Nabi SAW, pengharaman *riba* dilakukan secara berangsur-angsur meliputi 4 tahap. Diantaranya adalah surat Ar-Ruum ayat 39, lalu tahap berikutnya surat An-Nisa ayat 160-161, tahap berikutnya surat Ali-Imran ayat 130, dan tahap akhir yaitu surat Al-Baqarah ayat 275- 279:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ
الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا ۗ وَأَحَلَّ اللَّهُ

³⁵ Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan terjemahannya, Jakarta, CV Al Hanan, h. 123

³⁶ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam wa adillatuhu*, Penerjemah Abdul hayyie Al-Kaffaani dkk (Jakarta: Gema Insani, 2011), Cet. X, Jilid 5, h. 307

الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَاَ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ
وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ



Artinya: Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka Berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah Telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang Telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang Telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya”. (QS. Al-Baqarah (2): 275).³⁷

Menurut jumbuh ulama, riba ada dua macam yaitu riba fadhl, dan riba nasiah³⁸. Para fuqaha Hanafiyah mengartikan riba fadhl sebagai tambahan pada harta dalam akad jual beli sesuai ukuran syariat (yaitu takaran dan timbangan) jika barang yang ditukar sama³⁹. Riba fadhl juga didefinisikan sebagai jual beli barang ribawi dengan barang ribawi serupa dengan tambahan pada salah satunya. Sedangkan riba nasiah adalah Riba yang muncul karena adanya penanggungan penyerahan barang ribawi yang ditukarkan dengan barang ribawi sejenis sehingga karena penanggungan tersebut menimbulkan tambahan/perubahan.

³⁷ Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan terjemahannya, Jakarta, CV Al Hanan, h. 47

³⁸ *Al-Badaa'i* vol. V, h.274; *Bidaayatul Mujtahid*, vol. II, h. 129; *Haasyiyah ad-daasuuqii*, Vol. III, h. 47; *al-mughni* vol IV, h. 1; *I'laamul muwaqqi'ii*, vol. I, H. 135 dalam Wahbah AzZuhaili, *Fiqh Islam wa adillatuhu*, Penerjemah Abdul hayyie Al-Kaffaani dkk (Jakarta: Gema Insani, 2011), Cet. X, Jilid 5, h. 308-311

³⁹ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam wa adillatuhu*, Penerjemah Abdul Hayyie Al-Kaffaani dkk(Jakarta: Gema Insani, 2011), Cet. X, Jilid 5, h. 308-309

3. *Gharar*

Gharar menurut bahasa berarti *Al-Khathru* (bahaya atau risiko)⁴⁰. Menurut terminologi, *bay' al-gharar* adalah setiap akad jual beli yang mengandung risiko atau bahaya kepada salah satu pihak sehingga berpotensi mendatangkan kerugian finansial. Hal ini dikarenakan adanya keraguan dalam obyek yang akad tersebut karena ketidakjelasan. Para ulama dalam mendefinisikan *gharar* tersebut setidaknya dalam tiga makna, yaitu:⁴¹

- a. *Gharar* berhubungan dengan ketidakjelasan (*jahalah*) barang yang diperjualbelikan
- b. *Gharar* berhubungan dengan adanya keragu-raguan
- c. *Gharar* berhubungan dengan sesuatu yang tersembunyi akibatnya.

Pada dasarnya *gharar* ini merupakan hal yang harus dihindari dalam jual beli maupun bermuamalah pada umumnya karena menimbulkan ketidakjelasan antara satu pihak yang tidak mengetahui apa yang tersembunyi baik obyek, maupun akibatnya.

4. Haram

Diantara syarat sahnya jual beli menurut para ulama adalah harta yang diperjualbelikan berupa harta yang bisa dimanfaatkan menurut

⁴⁰ Enang Hidayat, *Fiqh Jual Beli*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya Offset, 2015), h. 101

⁴¹ Yasin Ahmad Ibrahim, *Nazhariyyah Al-Gharar Fi Syariah Al-Islamiyyah* (dirasah muqaranah), h.71

syara⁴². Selain itu, harta yang diperjual belikan tidak boleh merupakan barang yang haram yang dilarang secara syara untuk diperjualbelikan. Transaksi atau obyek barang yang haram dibedakan menjadi 2 yaitu haram lidzalitih (haram karena zatnya) dan haram lighairihi (haram karena sebab lain).

5. *Tadlis*

Tadlis adalah penipuan yang terjadi karena ketimpangan informasi tentang barang yang diperjualbelikan⁴³. Hal ini juga terlarang dalam syariat karena dapat merugikan suatu pihak. *Tadlis* dibedakan menjadi beberapa macam yaitu:



a. *Tadlis* Kuantitas

Yaitu penipuan karena menjual barang dengan kuantitas sedikit dengan harga barang kuantitas banyak.

b. *Tadlis* Kualitas

Yaitu menyembunyikan cacat atau kualitas barang yang buruk yang tidak sesuai dengan apa yang disepakati oleh penjual dan pembeli.

c. *Tadlis* Harga

⁴² Enang Hidayat, *Fiqih Jual Beli*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya Offset, 2015), h.146

⁴³ M Nur Rianto Al Arif dan Euis Amalia, *Teori Mikroekonomi: Suatu Perbandingan Ekonomi Islam Dan Ekonomi Konvensional*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2014), h. 286

Yaitu menjual barang lebih tinggi atau lebih rendah dari harga pasar karena ketidaktahuan pembeli atau penjual, dalam istilah fiqh disebut *ghaban*.

d. Tadlis waktu penyerahan

Yaitu penipuan yang dilakukan dengan menawarkan waktu penyerahan yang cepat namun penjual tidak dapat melaksanakannya pada waktunya.

B. Tinjauan Pustaka

Kajian pustaka dalam penelitian terdahulu merupakan hal yang sangat bermanfaat untuk menjadi perbandingan dan acuan yang memberikan gambaran terhadap hasil- hasil penelitian terdahulu yang menyangkut pertumbuhan ekonomi. Hal ini disadari bahwa untuk melakukan penelitian perlu ada suatu bentuk hasil penelitian terdahulu yang dijadikan referensi pembanding dalam penelitian, untuk itu bagian ini akan diberikan penjelasan beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan rencana penelitian sebagai berikut:

1. Roni Marice Br Sembiring (2014) Universitas Sumatera Utara Medan

Menganalisis Pengaruh Sistem Pembayaran Non Tunai Terhadap Stabilitas Moneter Di Indonesia. Berdasarkan hasil penelitian bahwa peningkatan pembayaran menggunakan kartu memiliki pengaruh terhadap inflasi dan nilai tukar rupiah. Hal ini terbukti hasil uji statistik yang menunjukkan hasil R square yang mencapai 81%. Angka ini menunjukkan

bahwa APMK memiliki pengaruh sebesar 81% terhadap kenaikan inflasi dan nilai tukar rupiah selama tahun 2011 sampai April 2014. Kehadiran alat pembayaran non tunai menggunakan kartu dapat mempengaruhi inflasi dan nilai tukar rupiah. Semakin banyak masyarakat menggunakan APMK secara langsung mempercepat proses perputaran uang.

2. Dio Nando Hasibuan (2015) Universitas Sumatera Utara Medan

Menganalisis tentang Analisis Pengaruh Transaksi Non Tunai Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia. Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah dilakukan bahwa peningkatan penggunaan uang non tunai dapat mempengaruhi jumlah uang beredar dimana juga akan mempengaruhi jumlah produk domestik bruto dalam hal ini pertumbuhan ekonomi Indonesia, sedangkan peningkatan produk domestik bruto (pertumbuhan ekonomi Indonesia) juga dapat meningkatkan penggunaan jumlah uang beredar dimana akan berakibat positif terhadap penggunaan uang non tunai masyarakat.

3. Rismawati Dewi Rukmana (2016) Universitas Brawijaya Malang

Menganalisis Dampak Perkembangan Pembayaran Non Tunai Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia. Berdasarkan hasil analisis data, dalam jangka pendek hanya variabel rasio uang kartal per giro dan nilai transaksi pembayaran berbasis kartu kredit ATM/debet yang berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi selama periode penelitian. Hal ini dikarenakan ketika pembayaran non tunai

meningkat maka akan meningkatkan jumlah uang di perbankan. Sedangkan dalam jangka panjang, semua variable yang digunakan tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi selama periode penelitian. Hal ini dikarenakan pembayaran yang dilakukan di Indonesia masih didominasi transaksi menggunakan uang tunai.

4. Harda Putra Aprileven (2015)

Menganalisis pengaruh faktor ekonomi terhadap inflasi yang dimediasi oleh jumlah uang beredar. Hasil penelitian menunjukkan, secara parsial, tingkat suku bunga berpengaruh negatif (signifikan) dan kurs berpengaruh positif (tidak signifikan) terhadap jumlah uang beredar. Secara parsial, tingkat suku bunga berpengaruh positif (signifikan), kurs berpengaruh positif (tidak signifikan), dan jumlah uang beredar berpengaruh positif (signifikan) terhadap inflasi. Jumlah uang beredar dalam penelitian menunjukkan tidak memediasi pengaruh tingkat suku bunga terhadap inflasi, tetapi memediasi pengaruh kurs terhadap inflasi.

5. Ahmad Radh Bajili (2016) Universitas Sumatera Utara Medan

Meneliti tentang Analisis Pengaruh Penggunaan Uang Elektronik (*E-Money*) Terhadap Permintaan Uang Kartal Di Indonesia. Berdasarkan hasil analisis data, jumlah APMK yang beredar memiliki pengaruh yang positif dan berpengaruh signifikan terhadap permintaan uang kartal Indonesia. Untuk jumlah perputaran kliring memiliki pengaruh yang negatif dan tidak berpengaruh signifikan terhadap permintaan uang kartal Indonesia.

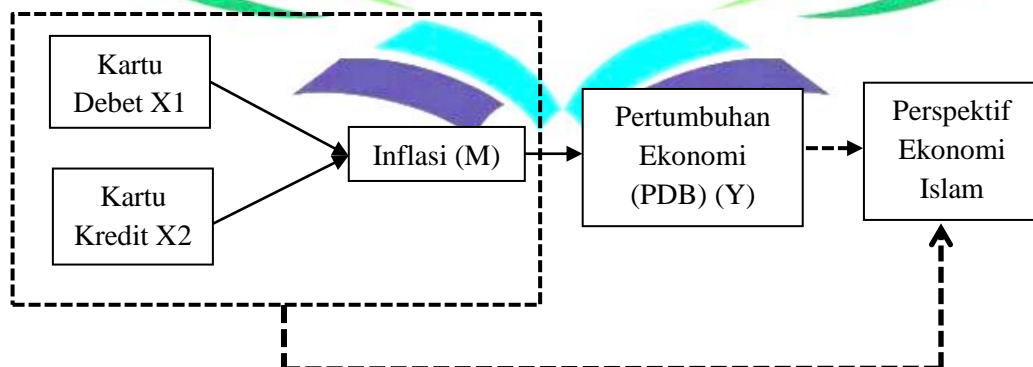
Sedangkan suku bunga deposito memiliki pengaruh yang negatif dan tidak berpengaruh signifikan terhadap permintaan uang di Indonesia.

Sumber: Penelitian Terdahulu (2014-2016).

Perbedaan antara penelitian saat ini dengan penelitian terdahulu adalah terletak pada judul penelitian yang menggunakan dua variabel bebas, satu variabel terikat dan juga menggunakan variabel intervening sedangkan penelitian terdahulu menggunakan dua sampai tiga variabel dan hanya menggunakan satu variabel terikat. Selain itu terdapat perbedaan waktu penelitian, penggabungan hasil penelitian, serta dalam penelitian ini menggunakan atau menjelaskan bagaimana pengaruh sistem pembayaran non tunai terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia dalam perspektif Ekonomi Islam.

C. Kerangka Pikir Penelitian

Kerangka konseptual dari penelitian ini disajikan dalam gambar



Kerangka pikir penelitian ini terdiri dari variabel independen, dependen, dan mediasi. Variabel independen terdiri dari sistem pembayaran non tunai

yaitu Kartu debit (X1) dan Kartu kredit (X2), sedangkan variabel dependen yaitu pertumbuhan ekonomi, dan variabel mediasi yaitu inflasi yang akan dikaji berdasarkan perspektif Ekonomi Islam.

Pada penelitian ini penulis ingin mengetahui bagaimanakah pengaruh sistem pembayaran non tunai terhadap pertumbuhan ekonomi. Variabel X (jumlah kartu ATM/Debet yang beredar dan jumlah kartu kredit beredar), kemudian Variabel Y nya adalah (pertumbuhan ekonomi), dan variabel interveningnya adalah inflasi dengan menggunakan dasar hukum yaitu Al-Qur'an dan Al-Hadist sebagai pedoman bagi penelitian ini.

D. Hipotesis

Hipotesis adalah jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dimana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan. Dikatakan sementara, karena jawaban yang diberikan baru didasarkan pada fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data.⁴⁴

Berdasarkan identifikasi rumusan masalah dan landasan teori yang telah diajukan sebelumnya maka dapat dikemukakan hipotesis sebagai berikut:
Penelitian Roni Marice Br Sembiring bahwa peningkatan pembayaran

⁴⁴ Prof.Dr.sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R & D* (Bandung: Alfabeta, 2016), h. 64

menggunakan kartu memiliki pengaruh terhadap inflasi dan nilai tukar rupiah. Kehadiran alat pembayaran non tunai menggunakan kartu dapat mempengaruhi inflasi dan nilai tukar rupiah. Semakin banyak masyarakat menggunakan APMK secara langsung mempercepat proses perputaran uang. Oleh karena itu, penggunaan APMK memiliki pengaruh signifikan terhadap inflasi dan nilai tukar, baik itu kartu ATM/ Debet maupun kartu kredit.

Hipotesis pertama:

H₀: Jumlah kartu ATM/ Debet beredar tidak berpengaruh positif terhadap inflasi.

H₁ : Jumlah kartu ATM/ Debet beredar berpengaruh positif terhadap inflasi

Hipotesis kedua:

H₀: Jumlah kartu kredit beredar tidak berpengaruh positif terhadap inflasi

H₂: Jumlah kartu kredit beredar berpengaruh positif terhadap inflasi

Hipotesis ketiga:

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Dio Nando Hasibuan tentang analisis Pengaruh Transaksi Non Tunai Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia. Hasil penelitian menjelaskan bahwa peningkatan penggunaan uang non tunai dapat mempengaruhi jumlah uang beredar dimana juga akan mempengaruhi jumlah produk domestik bruto dalam hal ini pertumbuhan

ekonomi Indonesia, sedangkan peningkatan produk domestik bruto (pertumbuhan ekonomi Indonesia) juga dapat meningkatkan penggunaan jumlah uang beredar dimana akan berakibat positif terhadap penggunaan uang non tunai masyarakat. Oleh karena itu, penggunaan APMK baik itu kartu ATM/ debet maupun kartu kredit memiliki pengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.

H_0 : Jumlah kartu ATM / Debet dan kartu kredit tidak berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi melalui inflasi sebagai variabel intervening

H_3 : Jumlah kartu ATM / Debet dan kartu kredit berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi melalui inflasi sebagai variabel intervening



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Waktu Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat deskriptif kuantitatif dengan tujuan menganalisis seberapa besar pengaruh sistem pembayaran non tunai terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia berupa data tahunan dengan periode tahun 2009 sampai 2017.

2. Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian atau pengambilan data berjalan sejak Januari 2019 sampai selesai. Lokasi penelitian atau pengumpulan data dilaksanakan melalui website resmi Bank Indonesia dan Badan Pusat Statistik (BPS).

B. Sumber Data

1. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder berupa data tahunan dengan periode tahun 2009 sampai 2017 dan berbentuk angka-angka kuantitatif yang diperoleh melalui data yang telah dipublikasikan oleh Bank Indonesia dan BPS melalui *website* resmi.

2. Metode Pengumpulan Data

Adapun cara penulis mengumpulkan data antara lain:

a. Studi Kepustakaan

Studi pustaka dilakukan dengan mempelajari dan mengambil data dari literatur terkait dan sumber-sumber lain seperti buku, catatan, maupun laporan hasil penelitian terdahulu yang dianggap dapat memberikan informasi mengenai penelitian ini.⁴⁵

b. Pengumpulan data

Pengumpulan data untuk keperluan riset ini penulis menggunakan data sekunder yang diperoleh dari data yang dipublikasikan oleh Bank Indonesia melalui *website* resmi Bank Indonesia dan BPS. Data yang di kumpulkan tersebut nantinya akan diatur, disusun dan disajikan dalam bentuk angka-angka dengan tujuan untuk mendapatkan gambaran yang jelas tentang sekumpulan data tersebut.

C. Populasi dan Sampel

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek atau subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.⁴⁶ Populasi dalam penelitian ini adalah data yang dikumpulkan berdasarkan jangka waktu yaitu perkembangan jumlah alat pembayaran dengan menggunakan kartu (APMK) beredar di Indonesia. Data pertumbuhan ekonomi (PDB) atas dasar

⁴⁵ Wiratna Sujarweni, *Metodologi Penelitian Bisnis dan Ekonomi*, (Yogyakarta: Pustaka Buana Press, 2015), h.157

⁴⁶ Prof. Dr. Sugiyono, *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*. (Bandung: Alfabeta, 2017), h. 119

harga konstan. Serta data inflasi yang semua data diambil sejak tahun 2009-2017.

Metode yang digunakan dalam pengambilan sampel penelitian ini adalah *purposive sampling* yaitu teknik penentuan sampel dengan pertimbangan atau kriteria tertentu.⁴⁷ Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut.⁴⁸ Dalam hal ini peneliti menggunakan sampel 9 tahun terakhir yaitu tahun 2009-2017.

D. Definisi Operasional Variabel

Variable penelitian adalah suatu atribut atau sifat atau nilai dari orang, obyek, organisasi atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang di tetapkan oleh peneliti untuk di pelajari dan kemudian ditarik kesimpulanya.⁴⁹ Adapun variabel dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Variabel Bebas (*Independent Variabel*)

Variabel bebas adalah variabel yang variasinya mempengaruhi variable lain. Dapat pula dikatakan variable bebas adalah variable yang pengaruhnya terhadap vaiabel lain yang ingin diketahui.⁵⁰ Dalam penelitian ini yang menjadi variable bebas adalah sebagai berikut :

a. Kartu Debet (X1)

⁴⁷ *Ibid*, hlm. 126

⁴⁸ *Ibid*, hlm. 120

⁴⁹ Kasmadi dan Nia Siti Sunariyah, *Panduan Modern Penelitian Kuantitatif*, Bandung: Alfabeta, 2014, Hlm. 96

⁵⁰ Saifudin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: PustakaPelajar, 2001), hlm. 62.

Kartu debit adalah sebuah kartu pembayaran secara elektronik yang diterbitkan oleh bank. Kartu ini dapat berfungsi sebagai pengganti pembayaran dengan uang tunai. Kartu ini mengacu pada saldo tabungan bank di bank penerbit tersebut. Fungsi dari kartu debit adalah untuk memudahkan pembayaran ketika berbelanja tanpa harus membawa uang tunai.

b. Kartu Kredit (X2)

Kartu kredit adalah kartu yang dikeluarkan oleh pihak bank yang dapat digunakan oleh penggunanya untuk membeli segala keperluan dan barang-barang serta pelayanan tertentu secara utang. Bisa juga diartikan secara langsung bahwa kartu kredit adalah kartu pinjaman. Atau kartu yang memberikan kesempatan kepada pengguna nya untuk mendapat kan pinjaman.

2. Variabel Terikat (*Dependent Research*)

Variabel terikat merupakan variable yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat, karena adanya variable bebas.⁵¹ Dalam hal ini yang menjadi variabel terikat adalah :

a. Pertumbuhan Ekonomi (Y)

Pertumbuhan ekonomi adalah proses perubahan kondisi perekonomian suatu negara secara berkesinambungan menuju keadaan yang lebih baik selama periode tertentu. Pertumbuhan ekonomi dapat diartikan juga sebagai proses kenaikan kapasitas produksi suatu

⁵¹ *Ibid*, hlm. 97

perekonomian yang diwujudkan dalam bentuk kenaikan pendapatan nasional. Adanya pertumbuhan ekonomi merupakan indikasi keberhasilan pembangunan ekonomi dalam kehidupan masyarakat.

3. Variabel Intervening

Variabel intervening merupakan variabel yang secara teoritis mempengaruhi hubungan antara variabel independen dengan dependen dapat juga diartikan variabel ini dapat memperlemah dan memperkuat hubungan antar variabel, tetapi tidak dapat diukur dan diamati. Adapun yang menjadi variable intervening dalam penelitian ini adalah:

a. Inflasi (M)

Inflasi adalah suatu proses meningkatnya harga - harga secara umum dan terus-menerus berkaitan dengan mekanisme pasar yang dapat disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain, konsumsi masyarakat yang meningkat, lebihnya likuiditas di pasar yang memicu konsumsi atau bahkan spekulasi, sampai termasuk juga akibat adanya ketidaklancaran distribusi barang.

Operasional variabel merupakan penjelasan mengenai cara-cara tertentu yang digunakan oleh peneliti untuk mengukur construct menjadi variabel penelitian yang dapat dituju, sehingga memungkinkan peneliti yang lain untuk melakukan replikasi pengukuran dengan cara yang sama,

atau mencoba untuk mengembangkan cara pengukuran construct yang lebih baik.⁵²

Tabel 1.2

Definisi Operasional Variabel

Operasional Variabel	Definisi Operasional Variabel	Indikator	Skala ukur
X1	Kartu ATM/ Debet adalah suatu alat pembayaran menggunakan kartu yang dananya berasal dari rekening (<i>account</i>) nasabah. Kartu ini merupakan kartu elektronik yang diterbitkan oleh bank yang berfungsi sebagai alat pengganti pembayaran dengan uang tunai.	Jumlah kartu ATM/ Debet beredar	Persentase (%)
X2	Kartu kredit merupakan kartu yang dikeluarkan oleh bank/ lembaga pembiayaan lainnya yang diberikan kepada nasabah untuk dapat dipergunakan sebagai alat pembayaran dan juga	Jumlah kartu kredit beredar	Persentase (%)

⁵² Husein Umar, *metode riset bisnis panduan mahasiswa untuk melaksanakan riset dilengkapi dengan contoh proposal dan hasil riset bidang manajemen dan akuntansi*, cetakan kedua, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2002, hlm. 233

	pengambilan uang tunai.		
Y	Inflasi adalah kecenderungan dari harga-harga untuk menaik secara umum dan terus menerus. Inflasi merupakan suatu keadaan yang di timbulkan oleh tidak adanya keseimbangan antara permintaan barang - barang dan persediaanya, yaitu permintaan melebihi persediaan dan semakin besar perbedaan itu semakin besar bahaya yang ditimbulkan oleh inflasi bagi kesehatan ekonomi.	Indeks harga konsumen pada periode tahun tersebut. Indeks harga Konsumen pada periode sebelum t.	Persentase (%)
M	Pertumbuhan ekonomi adalah sebagian dari perkembangan kesejahteraan masyarakat yang di ukur dengan pertumbuhan produk domestik regional bruto per kapita (PDRB per kapita). Pertumbuhan ekonomi berarti perkembangan kegiatan perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang di produksikan dalam	Pendapatan riil per kapita	Persentase (%)

	masyarakat bertambah dan kemakmuran masyarakat meningkat.		
--	---	--	--

E. Uji Statistik

1. Analisis Jalur

Analisis jalur merupakan perluasan dari analisis regresi linear berganda, atau analisis jalur adalah penggunaan analisis regresi untuk menaksir hubungan kausalitas antar variabel (model casual) yang telah ditetapkan sebelumnya berdasarkan teori. Apa yang dapat dilakukan oleh analisis jalur adalah menentukan pola hubungan antara tiga atau lebih variabel dan tidak dapat digunakan untuk mengkonfirmasi atau menolak hipotesis kausalitas imajiner. Analisis jalur digunakan untuk menganalisis pola hubungan antar variabel dengan tujuan untuk mengetahui pengaruh langsung maupun tidak langsung seperangkat variabel bebas terhadap variabel terikat.

Pengujian hipotesis dalam analisis jalur formula statistik uji-t nya adalah $t_i = \frac{P_{ij}}{S_{bi}}$, dimana S_b adalah *standard error* yang besarnya ditentukan oleh pengaruh parsial variabel eksogen terhadap endogen. Kriteria uji jika pada tingkat kepercayaan $\alpha = 5\%$ dengan derajat kebebasan $df = (n-k-1)$. Criteria pengujinya adalah sebagai berikut:

a) H_0 diterima H_a ditolak jika $t_{hitung} < t_{tabel}$

b) H_0 ditolak H_a diterima jika $t_{hitung} > t_{tabel}$

Jika H_0 ditolak, berarti peubah bebas yang diuji berpengaruh nyata terhadap peubah terikat.

Jika H_0 diterima berarti peubah bebas yang diuji tidak berpengaruh nyata terhadap peubah terikat.

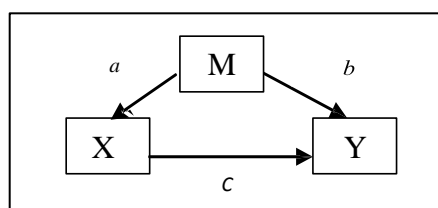
2. Analisis Regresi Variabel Mediasi

Variabel mediasi atau intervening merupakan variabel penyela atau antara yang terletak di antara variabel independen dan dependen, sehingga variabel independen tidak langsung mempengaruhi berubahnya atau timbulnya variabel dependen. Pola hubungan antara variabel secara langsung tanpa variabel mediasi dapat dilihat pada Gambar 1.



Gambar 1. Model regresi tanpa variabel mediasi

Pola hubungan antar variabel melalui variabel mediasi dapat dilihat pada Gambar II.



Gambar 2. Model regresi melalui variabel mediasi

untuk menguji analisis variabel mediasi dilakukan dengan metode kausal step yang dikembangkan oleh Baron dan Kenny, dan metode Product of Coefficient dikembangkan oleh Sobel. Adapun langkah-langkah dalam menggunakan Metode Kausal Step :

1. Membuat persamaan regresi variabel independen (X) terhadap variabel dependen (Y).
2. Membuat persamaan regresi variabel independen (X) terhadap variabel mediasi (M)
3. Membuat persamaan regresi variabel independen (X) terhadap variabel dependen (Y) dengan memasukkan variabel mediasi ukuran (M).
4. Menarik kesimpulan apakah variabel mediasi tersebut memediasi secara sempurna (perfect mediation) atau memediasi secara parsial (partial mediation).

Langkah-langkah tersebut menggunakan persamaan sebagai berikut:

$$\text{Persamaan I} : Y = \beta_0 + \beta_1 X$$

$$\text{Persamaan II} : M = \beta_0 + \beta_1 X$$

$$\text{Persamaan III} : Y = \beta_0 + \beta_1 X + \beta_2 M$$

Pada pengujian variabel M dinyatakan sebagai variabel mediasi atau intervening jika memenuhi kriteria sebagai berikut:

1. Jika pada persamaan I, variabel independen (X) berpengaruh terhadap variabel dependen (Y).
2. Jika pada persamaan II, variabel independen (X) berpengaruh terhadap variabel yang diduga sebagai variabel mediasi (M).
3. Jika pada persamaan III, variabel yang diduga sebagai variabel mediasi (M) berpengaruh terhadap variabel dependen (Y).

Kriteria Pengujian :

1. Variabel M dinyatakan sebagai variabel mediasi sempurna (perfect Mediation) jika setelah memasukkan variabel M, pengaruh variabel X terhadap Y yang tadinya signifikan (sebelum memasukkan variabel M) menjadi tidak signifikan setelah memasukkan variabel M ke dalam model persamaan regresi.
2. Variabel M dinyatakan sebagai variabel mediasi parsial (partial mediation) jika setelah memasukkan variabel M, pengaruh variabel X terhadap Y yang tadinya signifikan (sebelum memasukkan variabel M) menjadi tetap signifikan setelah memasukkan variabel M kedalam model persamaan regresi.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS DATA

A. HASIL PENELITIAN

1. Gambaran Perekonomian Indonesia 2009-2017

Pertumbuhan ekonomi bisa dibidang sebagai indikator berhasil atau tidaknya suatu pemerintahan dalam menjalankan, mengelola, dan membangun negara. Meskipun, ada banyak faktor baik di dalam negeri maupun di tataran global yang menjadi faktor penentu.

Menurut ekonom Amerika Serikat, Simon Kuznets, pertumbuhan ekonomi adalah suatu kenaikan kemampuan jangka panjang dari negara untuk menyediakan berbagai barang ekonomi kepada penduduknya. Kemampuan tersebut akan tumbuh seiring dengan adanya perkembangan atau kemajuan teknologi dan juga penyesuaian kelembagaan serta ideologi. Menurut salah seorang peraih Nobel Ekonomi ini, pertumbuhan ekonomi dicapai oleh tiga faktor, yakni peningkatan persediaan barang yang stabil, kemajuan teknologi, serta penggunaan teknologi secara efisien dan efektif.⁵³

Dalam perjalanannya, Indonesia mencatatkan pasang-surut pertumbuhan ekonomi. JEO (Journal of Educators Online) ini merangkum jejak pertumbuhan itu dari masa ke masa pemerintahan tujuh presiden yang pernah memimpin Indonesia, dari Soekarno

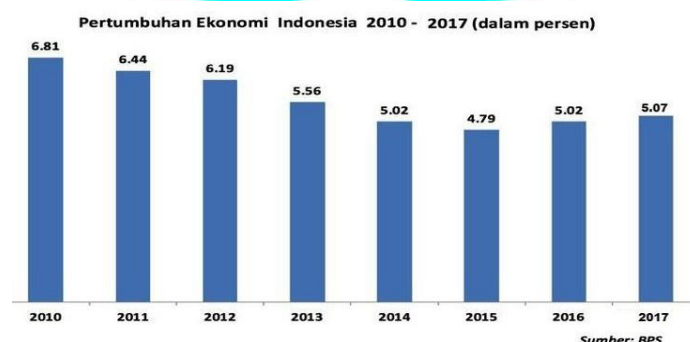
⁵³ Chief Economist Samuel Sekuritas, Lana Soelistianingsih, "Jejak pertumbuhan ekonomi Indonesia". Online tersedia di: <http://www.kompas.com>, Senin, 26 November 2018 | 17:50 WIB.

sampai Joko Widodo (Jokowi). Sebagai data awal, per kuartal III-2018, pertumbuhan ekonomi Indonesia tercatat 5,17 persen, lebih tinggi dibanding periode yang sama tahun lalu sebesar 5,06 persen. Secara tahunan, pertumbuhan ekonomi 2017 mencapai 5,07 %, angka tertinggi sejak 2014.

Angka diatas masih di bawah pertumbuhan ekonomi masa pemerintahan Soeharto yang sempat menembus 10%, sehingga ketika itu Indonesia dipuja-puji sebagai salah Macan Asia. Bahkan, kinerja ekonomi saat ini masih di bawah capaian pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono yang bisa di atas 6%. Namun, kondisi perekonomian Indonesia sekarang tetap dinilai sudah mulai stabil, setelah mengalami kejatuhan pada krisis 1998. Saat itu inflasi meroket drastis 80% dengan pertumbuhannya minus.

Tabel 4.1

Grafik Pertumbuhan Ekonomi 2010-2017



Grafik Pertumbuhan Ekonomi Indonesia dari tahun ke tahun.(Kompas.com)

Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan, produk domestik bruto (PDB) atau pertumbuhan ekonomi Indonesia selama tahun 2017 mencapai 5,07%. Angka ini, menurut BPS, merupakan angka pertumbuhan ekonomi tertinggi sejak tahun 2014 silam.

Kepala BPS Suhariyanto menyebut, angka pertumbuhan ekonomi pada tahun 2017 tersebut lebih rendah dari target yang dipasang pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), yakni 5,2%. Namun demikian, ia optimistis ekonomi Indonesia ke depan bisa tumbuh lebih tinggi. Ia menyebut, pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2017 merupakan angka tertinggi sejak tahun 2014. Sekedar informasi, pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2014 sebesar 5,01%, tahun 2015 sebesar 4,88%, dan tahun 2016 sebesar 5,03%. Ia juga menyebutkan, sumber pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2017 adalah industri pengolahan, yakni 0,91%. Selain itu, disusul sektor konstruksi sebesar 0,67%, perdagangan 0,59% dan pertanian 0,49%. "Sumber pertumbuhan 3 tahun terakhir dari industri pengolahan. Kalau bisa meningkatkan pertumbuhan di industri dampaknya bisa besar, karena menyerap banyak tenaga kerja dan kontribusinya besar sekali," sebut Suhariyanto.⁵⁴

2. Perkembangan Sistem Pembayaran Tahun 2009 – 2017

⁵⁴ Sakina Rakhma Diah Setiawan "Ekonomi Indonesia 2017 Tumbuh 5,07 Persen, Tertinggi Sejak Tahun 2014". (on-line), tersedia di: [Http://www.kompas.com](http://www.kompas.com) - 05/02/2018, 11:38 WIB

Sistem pembayaran tidak dapat dipisahkan dari perkembangan uang yang diawali dari pembayaran secara tunai sampai kepada pembayaran elektronik yang bersifat non tunai. Perkembangan sistem pembayaran didorong oleh semakin besarnya volume dan nilai transaksi, peningkatan risiko, kompleksnya transaksi, dan perkembangan teknologi. Sistem pembayaran tunai berkembang dari commodity money sampai fiat money, sementara sistem pembayaran nontunai berkembang dari yang berbasis warkat (cek, bilyet giro, dan sebagainya) sampai kepada yang berbasis elektronik (kartu dan electronic money). Dengan perkembangan tersebut, peran sistem pembayaran menjadi semakin penting dalam perekonomian.

Sistem pembayaran adalah suatu sistem yang mencakup pengaturan, kontrak/perjanjian, fasilitas operasional, dan mekanisme teknis yang digunakan untuk penyampaian, pengesahan dan penerimaan instruksi pembayaran, serta pemenuhan kewajiban pembayaran melalui pertukaran “nilai” antar perorangan, bank, dan lembaga lainnya baik domestik maupun cross border ‘antarnegara’.⁵⁵

Sistem Pembayaran merupakan sistem yang berkaitan dengan pemindahan sejumlah nilai uang dari satu pihak ke pihak lain. Media yang digunakan untuk pemindahan nilai uang tersebut sangat beragam, mulai dari penggunaan alat pembayaran yang sederhana sampai pada

⁵⁵Sri Mulyati Tri Subari dan Ascarya, *Kebijakan Sistem Pembayaran di Indonesia*, Pusat Pendidikan Dan Studi Kebanksentralan (Ppsk) Bank Indonesia No.8, (Jakarta, Desember 2003), hlm. 2

penggunaan sistem yang kompleks dan melibatkan berbagai lembaga berikut aturan mainnya. Kewenangan mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran di Indonesia dilaksanakan oleh Bank Indonesia yang dituangkan dalam Undang Undang Bank Indonesia.

Dalam menjalankan mandat tersebut, BI mengacu pada empat prinsip kebijakan sistem pembayaran, yakni keamanan, efisiensi, kesetaraan akses dan perlindungan konsumen. Aman berarti segala risiko dalam sistem pembayaran seperti risiko likuiditas, risiko kredit, risiko fraud harus dapat dikelola dan dimitigasi dengan baik oleh setiap penyelenggaraan sistem pembayaran. Prinsip efisiensi menekankan bahwa penyelenggaraan sistem pembayaran harus dapat digunakan secara luas sehingga biaya yang ditanggung masyarakat akan lebih murah karena meningkatnya skala ekonomi. Kemudian prinsip kesetaraan akses yang mengandung arti bahwa BI tidak menginginkan adanya praktek monopoli pada penyelenggaraan suatu sistem yang dapat menghambat pemain lain untuk masuk. Terakhir adalah kewajiban seluruh penyelenggara sistem pembayaran untuk memperhatikan aspek-aspek perlindungan konsumen.

Untuk mendukung lancarnya aktivitas pembayaran, inovasi-inovasi baru dalam sistem pembayaran banyak tercipta sebagai dampak positif dari perkembangan teknologi informasi. Hal ini tentunya bertujuan untuk memberikan kemudahan dan kenyamanan bagi masyarakat pengguna. Namun demikian, diperlukan suatu kebijakan dari Bank

Indonesia untuk selalu menjaga dan meningkatkan keamanan dan efisiensi dalam penyelenggaraan sistem pembayaran dengan tetap memperhatikan pemenuhan aspek perlindungan konsumen. Penguatan dari sisi infrastruktur menjadi fokus utama dalam pengembangan sistem pembayaran di tahun 2010.

Data Bank Dunia menyebutkan, rasio jumlah mesin ATM yang ada di Indonesia sebanyak 54,745 mesin per 100.000 orang dewasa pada 2016. Angka ini terus mengalami pertumbuhan, padahal pada 2011, rasio jumlah ATM masih 16,448 per 100.000 orang dewasa.⁵⁶

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat jumlah mesin ATM yang ada di Indonesia kuartal III-2017 sebanyak 102.682 unit. Jumlah tersebut bertambah 1.236 dalam kurun waktu tiga bulan menjadi sebanyak 103.918 unit ATM per triwulan IV-2017. Penambahan unit mesin ATM ini bagaikan dua sisi mata uang. Satu sisi dapat diartikan bahwa akses masyarakat menjadi lebih mudah dalam transaksi keuangan. Selain itu, ada potensi besar dari risiko skimming.⁵⁷

3. Peran Sistem Pembayaran dalam Perekonomian

Peran sistem pembayaran dalam perekonomian semakin hari semakin penting seiring dengan semakin meningkatnya volume dan nilai transaksi, serta sejalan dengan pesatnya perkembangan teknologi.

⁵⁶ Jumlah mesin ATM beredar 2018, diakses pada tanggal 17 Mei 2019
<https://tirto.id/suatu-saat-nasabah-bank-tak-butuh-lagi-mesin-atm-cLn4>.

⁵⁷ Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia, *Laporan Triwulan iv-2017* (Jakarta: 2017)

Dengan semakin meningkatnya transaksi tersebut, maka risiko yang ditimbulkan menjadi semakin besar karena dengan terganggunya sistem pembayaran dapat membahayakan stabilitas sistem dan pasar keuangan secara keseluruhan.

Menurut Sheppard peran penting sistem pembayaran dalam perekonomian adalah sebagai berikut:⁵⁸

- a. Sebagai elemen penting dalam infrastruktur keuangan suatu perekonomian untuk mendukung stabilitas keuangan. Hal itu disebabkan sistem keuangan dan perbankan berkaitan erat dengan sistem pembayaran. Gangguan di sistem pembayaran akan menimbulkan keterlambatan atau kegagalan kewajiban pembayaran, yang pada gilirannya akan menyebabkan turunnya kepercayaan masyarakat terhadap likuiditas dan stabilitas sistem keuangan dan perbankan. Demikian pula sebaliknya. Krisis keuangan dan perbankan yang mempengaruhi satu atau lebih bank peserta sistem pembayaran akan mempengaruhi setelmen antarbank dan dapat menyebabkan gridlock “kemacetan” di dalam keseluruhan sistem pembayaran. Oleh karena itu, diperlukan koordinasi yang baik antara pihak bank dan pengawas pasar keuangan dengan pengawas sistem pembayaran, untuk memastikan agar masalah-masalah tersebut dapat diantisipasi dan diselesaikan seawal mungkin.

⁵⁸Sri Mulyati Tri Subari dan Ascarya, *Kebijakan Sistem Pembayaran di Indonesia*, Pusat Pendidikan Dan Studi Kebanksentralan (Ppsk) Bank Indonesia No.8, (Jakarta, Desember 2003), hlm.5


- b. Sebagai channel “saluran” penting dalam pengendalian ekonomi yang efektif, khususnya melalui kebijakan moneter. Dengan lancarnya sistem pembayaran, kebijakan moneter dapat mempengaruhi likuiditas perekonomian sehingga proses transmisi kebijakan moneter dari sistem perbankan ke sektor riil dapat menjadi lancar.
- c. Sebagai alat untuk mendorong efisiensi ekonomi. Keterlambatan dan ketidak lancaran pembayaran akan mengganggu perencanaan keuangan usaha dan pada akhirnya akan mengakibatkan penurunan produktivitas perekonomian. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa peranan sistem pembayaran penting dalam suatu perekonomian, yaitu untuk menjaga stabilitas keuangan dan perbankan, sebagai sarana transmisi kebijakan moneter, serta sebagai alat untuk meningkatkan efisiensi ekonomi suatu negara. Untuk itu, sistem pembayaran perlu diatur dan diawasi dengan baik agar sistem pembayaran berjalan dengan aman dan lancar.

4. Inflasi

Inflasi juga merupakan suatu masalah bagi ekonomi makro yang apabila tidak segera ditangani akan menyebabkan ketidakstabilan perekonomian yang pada akhirnya hanya akan memperburuk kinerja perekonomian suatu negara. Kestabilan nilai mata uang, baik inflasi maupun nilai tukar sangat penting untuk mendukung pembangunan

ekonomi yang berkelanjutan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Inflasi adalah kecenderungan meningkatnya harga barang dan jasa secara umum dan terus menerus.⁵⁹ Inflasi adalah proses peningkatan harga secara umum dan terus menerus. Indikator yang digunakan untuk melihat inflasi adalah indeks harga konsumen. Di mana indeks yang menunjukkan tingkat harga barang dan jasa yang harus dibeli konsumen dalam periode tertentu. Dalam indeks harga konsumen, setiap jenis barang ditentukan suatu timbangan atau bobot tetap yang proporsional terhadap kepentingan relatif dalam anggaran pengeluaran konsumen.⁶⁰ Perkembangan inflasi dapat dilihat pada tabel di bawah ini:



Tabel 4.2
Inflasi
Tahun 2009-2017

Tahun	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Inflasi	2.78	6.96	3.79	4.30	8.38	8.36	3.35	3.02	3.61

Sumber : Badan Pusat Statistik

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa inflasi mengalami peningkatan dari 2009 ke 2010 sebesar 6,19 % dibandingkan dengan tahun sebelumnya hanya mencapai 2,78 %, dan pada tahun 2014 inflasi

⁵⁹Rahardja Pratama, Mandala Manurung, *Teori Ekonomi Makro Suatu Pengantar Edisi Ketiga* (Jakarta: FEUI, 2004), hlm.359.

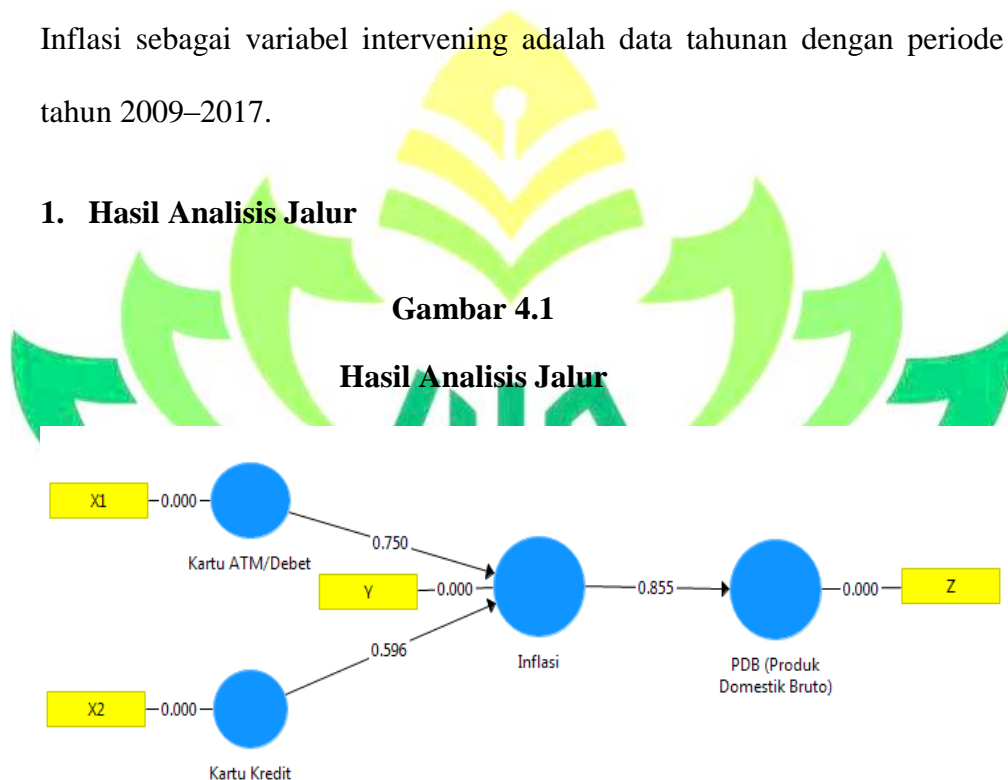
⁶⁰*Ibid*, hlm. 367

mengalami peningkatan mencapai 8.36 %, sedangkan di tahun 2005 mengalami penurunan menjadi 3,35 %. Pada tahun 2017 inflasi mengalami peningkatan mencapai 3,61 %. Hal tersebut dipicu terutama oleh kenaikan harga komoditas internasional terutama minyak dan pangan.

B. ANALISIS DATA

Analisa data yang digunakan dalam penelitian ini untuk mengetahui bagaimana besar pengaruh jumlah jumlah ATM / debet beredar dan jumlah kartu kredit beredar terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia dan Inflasi sebagai variabel intervening adalah data tahunan dengan periode tahun 2009–2017.

1. Hasil Analisis Jalur



Gambar diatas menunjukkan konstruk kartu ATM/ Debet (X1) diukur dengan satu buah dimensi. Konstruk kartu kredit (X2) diukur dengan satu buah dimensi. Konstruk Inflasi (M) diukur dengan satu buah dimensi. Dan

konstruk PDB (Y) diukur dengan satu buah dimensi. Arah panah antara dimensi dengan konstruk laten adalah menuju dimensi yang menunjukkan bahwa penelitian ini menggunakan dimensi reflektif dan dimensi yang relative sesuai untuk mengukur persepsi. Hubungan yang akan diteliti (hipotesis) dilambangkan dengan anak panah antar konstruk.

a. Pengujian model structural (inner model) pengujian hipotesis

Dalam pembahasan ini akan dibahas mengenai korelasi dari setiap variable independen dan dependen yang dimediasi oleh variable intervening.

Gambar 4.4

Hasil R Square

	R Square	R Square Adjusted
Inflasi	0,138	-0,206
PDB (Produk Domestik Bruto)	0,068	-0,087

Dari output gambar diatas menunjukkan bahwa nilai R Square dari model pertama sebesar 0,138 artinya kartu ATM/Debit (X1), Kartu kredit (X2) mampu menjelaskan Inflasi (M) sebesar 13.8%, sisanya 86,2% dijelaskan oleh faktor lain diluar penelitian. Sedangkan R Square dari model kedua sebesar 0.068 artinya Inflasi (M) mampu menjelaskan Pertumbuhan Ekonomi PDB (Y) sebesar 6,8% sisanya 93.2% dijelaskan oleh faktor lain diluar penelitian.

Model struktur dalam PLS dievaluasi dengan menggunakan R square untuk variable dependen dan nilai koefisien pada path untuk variable independen yang kemudian dinilai signifikansinya berdasarkan nilai t-statistik setiap path. Untuk melihat signifikansi model prediksi dalam pengujian model structural, dapat dilihat dari nilai p value antarvariabel independen dan variable dependen. Dinyatakan hipotesis H0 diterima jika nilai p value lebih besar > dari 0,05 dan dinyatakan H0 ditolak jika nilai p value lebih kecil < dari 0,05 atau kriteria pengujianya sebagai berikut:

- a) Ho diterima Ha ditolak jika $t_{hitung} < t_{tabel}$
- b) Ho ditolak Ha diterima jika $t_{hitung} > t_{tabel}$

Gambar 4.5
Path Coefficients

	Original Sample (O)	Sample Mean (M)	Standard Deviation (STDEV)	T Statistics (O/STDEV)	P Values
Inflasi -> PDB (Produk Domestik Bruto)	-0,262	-0,262	0,306	0,855	0,393
Kartu ATM/Debet -> Inflasi	0,300	0,240	0,401	0,750	0,454
Kartu Kredit -> Inflasi	0,234	0,218	0,392	0,596	0,552

Berdasarkan nilai t-statistik pada gambar diatas dapat diuji hasil hipotesis sebagai berikut:

1. Pengaruh kartu ATM/ Debet terhadap PDB (Produk Domestik Bruto)

H0 : Kartu ATM/ debit tidak berpengaruh positif terhadap PDB (Produk Domestik Bruto)

H1 : Kartu ATM/ debit berpengaruh positif terhadap PDB (Produk Domestik Bruto)

Dari hasil perhitungan diatas diperoleh nilai t-statistik pengetahuan X1 sebesar 0,855 lebih kecil dari nilai t-tabel 1.83311 dan nilai p value 0,393 lebih besar dari 0.05 yang artinya H0 diterima dan H1 ditolak, berarti kartu ATM/ debit tidak berpengaruh positif terhadap inflasi.

2. Pengaruh kartu kredit terhadap PDB (Produk Domestik Bruto)

H0 : Kartu kredit tidak berpengaruh positif terhadap PDB (Produk Domestik Bruto)

H2 : Kartu kredit berpengaruh positif terhadap PDB (Produk Domestik Bruto)

Dari hasil perhitungan diatas diperoleh nilai t-statistik pengetahuan X2 sebesar 0,750 lebih kecil dari nilai t-tabel 1.83311 dan nilai p value 0,454 lebih besar dari 0.005 yang artinya H0 diterima dan H2 ditolak, berarti kartu kredit tidak berpengaruh positif terhadap inflasi.

3. Pembuktian intervening variable, pengaruh kartu ATM/ debit dan kartu kredit terhadap PDB (Produk Domestik Bruto) melalui kesesuaian inflasi

H0 : Kartu ATM/ debit dan kartu kredit tidak berpengaruh positif terhadap PDB (Produk Domestik Bruto) melalui kesesuaian inflasi

H3 : Kartu ATM/ debit dan kartu kredit berpengaruh positif terhadap PDB (Produk Domestik Bruto) melalui kesesuaian inflasi

Berdasarkan hasil pengolahan data diatas dapat diketahui nilai pengaruh langsung antara variable inflasi terhadap PDB (Produk Domestik Bruto) adalah sebesar 0,234 sedangkan pengaruh tidak langsung antara variable X1 dan X2 terhadap PDB (Produk Domestik Bruto) melalui inflasi sebesar -0.0786 (-0.262×0.300) . Dengan membandingkan kedua nilai tersebut dapat dibuktikan bahwa pengaruh variable X1 dan X2 terhadap PDB (Produk Domestik Bruto) secara tidak langsung lebih besar dari pada pengaruh variable X1 dan X2 terhadap PDB (Produk Domestik Bruto) melalui Inflasi (Y), sehingga dapat disimpulkan bahwa inflasi (Y) bukan merupakan intervening bagi kartu ATM/ debit maupun kartu kredit dan juga bukan intervening bagi PDB (Produk Domestik Bruto).

b. Evaluasi goodness of fit

Analisis ini digunakan untuk mengetahui apakah model yang dihasilkan cukup baik untuk menjelaskan fenomena yang dikaji. Dari hasil analisis goodness of fit model diperoleh nilai q square;

$$Q^2 = 1 - (1 - 0.138)(1 - 0,068)$$

$$= 1 - (0.862) (0.932)$$

$$= 1 - 0.803384$$

$$= 0.196616$$

Hal ini mengindikasikan bahwa dari perhitungan statistik, maka model tersebut buruk. Karena variasi variabel yang terlibat dalam model hanya mampu menjelaskan variabel-variabel yang mempengaruhi PDB (Produk Domestik Bruto) sebesar 19.66% dan sisanya 80.34% merupakan faktor lain yang turut mempengaruhi PDB (Produk Domestik Bruto) yang tidak dimasukkan dalam model penelitian.

2. Pembahasan

a. Analisis pengaruh kartu ATM/ Debet terhadap inflasi (X1 ke M)

Kartu ATM/ Debet merupakan instrumen pembayaran berbasis kartu yang pembayarannya dilakukan dengan pendebitan langsung ke rekening nasabah di bank penerbit kartu tersebut. Jumlah kartu ATM/debet beredar dapat mempengaruhi inflasi yang terjadi pada suatu negara karena dapat mengurangi jumlah uang kartal yang beredar pada masyarakat. Menurunnya jumlah uang beredar tentu diimbangi dengan menurunnya permintaan akan uang tunai pada suatu negara. Jumlah kartu ATM/ Debet beredar meningkat memberikan dampak positif terhadap kegiatan jual beli masyarakat secara tunai, sehingga mengurangi jumlah biaya percetakan terhadap uang kertas tersebut. Jika biaya terhadap percetakan uang tunai dan

jumlah uang tunai beredar berkurang maka akan mengurangi terjadinya inflasi pada suatu negara.

Dari hasil perhitungan yang diperoleh berdasarkan hasil olah data menjelaskan bahwa nilai t-statistik kartu ATM/ Debet (X1) sebesar 0,855 lebih kecil dari nilai t-tabel 1.83311 dan nilai p value 0,393 lebih besar dari 0.05 yang artinya kartu ATM/ debet beredar tidak berpengaruh positif terhadap inflasi.

Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa apabila jumlah kartu ATM/ Debet beredar pada suatu negara meningkat, maka tidak berpengaruh terhadap menurunnya inflasi yang terjadi pada suatu negara tersebut. Jumlah kartu ATM/ Debet beredar meningkat hanya akan berpengaruh pada menurunnya jumlah uang beredar pada masyarakat. Hal ini disebabkan bertransaksi non tunai bisa dilakukan dengan lebih efisien dan aman, tanpa harus membawa uang secara tunai.

b. Pengaruh jumlah kartu kredit beredar terhadap inflasi (X2 ke M)

Kartu kredit merupakan kartu yang dikeluarkan oleh bank atau lembaga pembiayaan lainnya yang diberikan kepada nasabah untuk dapat dipergunakan sebagai alat pembayaran dan pengambilan uang tunai. Jumlah kartu kredit beredar memiliki pengaruh positif terhadap inflasi. Semakin banyak jumlah kartu kredit beredar maka akan mengurangi jumlah uang tunai beredar pada masyarakat,

sehingga penurunan tersebut dapat mengurangi terjadinya inflasi pada suatu negara.

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan diperoleh nilai t-statistik kartu kredit (X_2) sebesar 0,750 lebih kecil dari nilai t-tabel 1.83311 dan nilai p value 0,454 lebih besar dari 0.005 artinya H_0 diterima dan H_2 ditolak. Sehingga dapat disimpulkan bahwa jumlah kartu kredit beredar tidak berpengaruh positif terhadap inflasi. Meningkatnya jumlah kartu kredit beredar hanya dapat menekan banyaknya jumlah uang kartal yang beredar pada masyarakat. Secara teoritis, bertransaksi dengan uang giral maupun uang kartal, jumlah uang beredar akan tetap sama. Transaksi non tunai hanya akan berpengaruh terhadap kenyamanan dalam bertransaksi serta kurangnya biaya percetakan uang kartal. Hasil penelitian ini sesuai dengan pernyataan kepala kantor perwakilan Bank Indonesia yang mengatakan bahwa semakin gencarnya dorongan pada masyarakat untuk melakukan transaksi secara non tunai secara langsung tidak berpengaruh terhadap inflasi yang menjadi perhitungan perkembangan perekonomian suatu negara. Menurutnya, hal yang mempengaruhi inflasi tersebut hanya pada meningkatnya permintaan dan penawaran saja terhadap barang yang beredar.⁶¹

⁶¹ Puji Atmoko, "Transaksi Non Tunai Tidak Pengaruhi Inflasi". Online tersedia di: <http://www.ANTARANews.com>, Minggu, 31 Juli 2016

c. Pengaruh sistem pembayaran non tunai pertumbuhan ekonomi dengan inflasi sebagai variabel intervening (X1 dan X2 ke Y melalui M)

Jumlah ATM / debit beredar dan jumlah kartu kredit beredar bersama-sama menunjukkan pengaruh yang negatif terhadap inflasi. Berdasarkan hasil pengolahan data yang telah dilakukan dapat diketahui nilai pengaruh langsung antara variable inflasi terhadap PDB (Produk Domestik Bruto) adalah sebesar 0,234 sedangkan pengaruh tidak langsung antara variable X1 dan X2 terhadap PDB (Produk Domestik Bruto) melalui inflasi sebesar -0.0786 (-0.262×0.300) . Dengan membandingkan kedua nilai tersebut dapat dibuktikan bahwa pengaruh variable X1 dan X2 terhadap PDB (Produk Domestik Bruto) secara tidak langsung lebih besar dari pada pengaruh variable X1 dan X2 terhadap PDB (Produk Domestik Bruto) melalui Inflasi (M), sehingga dapat disimpulkan bahwa inflasi (M) bukan merupakan intervening bagi kartu ATM/ debit maupun kartu kredit dan juga bukan intervening bagi PDB (Produk Domestik Bruto). Artinya jumlah kartu ATM/ debit dan kartu kredit beredar melalui inflasi sebagai variabel intervening tidak berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi.

Namun demikian, peningkatan jumlah kartu ATM / debit beredar dan jumlah kartu kredit beredar bersama-sama akan mengurangi porsi penggunaan uang tunai dalam mendukung aktifitas konsumsi masyarakat. Artinya apabila jumlah APMK (Alat Pembayaran Menggunakan Kartu) meningkat seperti ATM / debit dan kartu kredit maka akan mengurangi jumlah uang tunai yang beredar di masyarakat. Peningkatan APMK (Alat Pembayaran Menggunakan Kartu) berpengaruh pada tingkat kenyamanan dan keamanan masyarakat dalam melaksanakan aktifitas perekonomian.

Hal ini sejalan dengan upaya perbankan untuk menghimpun dana murah melalui tabungan yang menyediakan ATM sebagai insentif untuk memberikan kemudahan bagi konsumen dalam melakukan transaksi. Peningkatan nilai dan volume transaksi menggunakan kartu ATM / debit meningkatkan nilai dan volume transaksi menggunakan APMK mengingat hingga saat ini kontribusi terbesar dalam transaksi APMK disumbang oleh kartu ATM / debit. Hal ini juga sejalan dengan program kerja Bank Indonesia untuk mewujudkan masyarakat non tunai serta mengurangi peredaran uang kartal di Indonesia dan beralih kepada sistem pembayaran non tunai yang lebih efisien dan aman dalam bertransaksi. Perkembangan kartu kredit di Indonesia kini makin semarak. Hal ini terlihat dari terus bertambahnya jenis kartu kredit yang diterbitkan, meningkatnya jumlah nasabah, dan melonjaknya

jumlah kartu kredit beredar maupun nilai transaksinya dalam beberapa tahun terakhir.

Pertumbuhan yang signifikan ini menunjukkan bahwa kartu kredit kini makin populer sebagai alat pengganti uang tunai, bahkan telah menjadi bagian dari gaya hidup masyarakat modern di Indonesia. Selain dipicu oleh perkembangan lifestyle masyarakat di kota-kota besar, pertumbuhan bisnis kartu kredit ini juga ditunjang oleh beragamnya program menarik yang ditawarkan perusahaan penerbit, mengikuti selera dan kebutuhan nasabah yang makin bervariasi. Berbagai tawaran kartu kredit yang menarik saat ini banyak bertebaran di sejumlah media cetak, elektronik, media online, dan juga melalui layanan SMS. Makin bertambahnya jumlah masyarakat kelas menengah di Indonesia, yang disertai kenaikan pendapatan per kapita seiring membaiknya kondisi ekonomi makro daerah, juga menjadi faktor pendorong lainnya bagi kenaikan jumlah kartu kredit dan nominal kartu kredit yang beredar.

- d. Bagaimana perspektif ekonomi islam terhadap sistem pembayaran non tunai berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi

Hasil pembahasan dalam penelitian ini memberikan penjelasan terhadap sistem pembayarn non tunai yang di kaji berdasarkan perspektif ekonomi islam. Uang elektronik pada dasarnya sama

seperti uang biasa karena memiliki fungsi sebagai alat pembayaran atas transaksi jual beli barang. Dalam perspektif syariah hukum uang elektronik adalah halal. Kehalalan ini berlandaskan kaidah; setiap transaksi dalam muamalah pada dasarnya diperbolehkan kecuali jika ada dalil yang mengharamkannya, maka saat itu hukumnya berubah menjadi haram.

Oleh karena itu uang elektronik harus memenuhi kriteria dan ketentuan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah seperti yang akan diterangkan selanjutnya dalam tulisan ini. Faktor lainnya yang menjadi alasan kehalalan uang elektronik adalah, karena adanya tuntutan kebutuhan manusia akan uang elektronik, dan pertimbangan banyaknya kemaslahatan yang ada di dalamnya.

Saat ini beberapa Bank Syariah juga telah mengeluarkan produk yang terkait dengan uang elektronik. Mereka tidak akan berani meluncurkan produk itu kecuali setelah mendapat dukungan dari otoritas jasa keuangan dan MUI dalam hal ini melalui fatwa Dewan Syariah Nasional. Artinya uang elektronik sudah sah digunakan baik menurut agama maupun Negara. Selanjutnya yang dibutuhkan adalah kebijakan dan penghematan dalam menggunakannya, agar tidak boros & menyebabkan kerugian di lain hari.

a. Pembayaran Non Tunai dalam Ekonomi Islam

Pembayaran non tunai dalam hukum ekonomi syariah harus didasarkan pada prinsip-prinsip sebagai berikut:

1. Tidak Mengandung Maysir (unsur perjudian, untung-untungan atau spekulatif yang tinggi). Penyelenggaraan uang elektronik harus didasarkan oleh adanya kebutuhan transaksi pembayaran ritail yang menuntut transaksi secara lebih cepat dan efisien, tidak untuk transaksi yang mengandung maysir.
2. Tidak Menimbulkan Riba yang berbentuk pengambilan tambahan, baik dalam transaksi jual-beli maupun pinjam-meminjam dan pengalihan harta secara batil. Transaksi uang elektronik merupakan transaksi tukar-menukar/jual beli barang ribawi, yaitu antara nilai uang tunai dengan nilai uang elektronik dalam bentuk Rupiah. Pertukaran antara nilai uang tunai dengan nilai uang elektronik harus sama jumlahnya (tamatsul) baik kualitas maupun kuantitasnya, jika tidak, maka tergolong ke dalam bentuk riba al-fadl (tambahan atas salah satu dua barang yang dipertukarkan dalam pertukaran barang Ribawi yang sejenis. Oleh karena itu, tidak boleh melakukan pertukaran nilai uang tunai yang lebih kecil atau lebih besar dari nilai uang elektronik.

Sebagai contoh penerbit tidak boleh menjual uang elektronik sebesar Rp 3.000.000,00 dengan penyetoran uang/dana dari pemegang kepada penerbit sebesar Rp

3.030.000,00 dan penerbit juga tidak boleh memberikan potongan harga atas penjualan uang elektronik, seperti uang elektronik dengan nilai uang elektronik sebesar Rp 3.000.000,00 dijual oleh penerbit melalui penyetoran uang/dana dari pemegang kepada penerbit sebesar Rp 2.970.000,00, kelebihan pembayaran oleh pemegang dan potongan harga oleh penerbit tersebut termasuk riba al-fadl.

Pertukaran antara nilai uang tunai dengan nilai uang elektronik harus dilakukan secara tunai (taqabudh), jika tidak, maka tergolong ke dalam bentuk riba al-nasiah (penundaan penyerahan salah satu dua barang yang dipertukarkan dalam jual-beli barang ribawiyang sejenis). Sebagai contoh pada saat pemegang atau pedagang menukarkan kembali (refund/redeem) nilai uang elektronik dengan nilai uang tunai kepada penerbit, maka penerbit harus memenuhi hak tagih tersebut dengan tepat waktu tanpa melakukan penangguhan pembayaran.

3. Tidak Mendorong Israf (Pengeluaran yang Berlebihan) Uang elektronik pada dasarnya digunakan sebagai alat pembayaran ritail/mikro, agar terhindar dari Israf(pengeluaran yang berlebihan) dalam konsumsi dilakukan pembatasan jumlah nilai uang elektronik serta

batas paling banyak total nilai transaksi uang elektronik dalam periode tertentu.

4. Tidak Digunakan untuk Transaksi objek Haram dan Maksiat
Uang elektronik sebagai alat pembayaran dengan menggunakan prinsip Syariah, uang elektronik tidak boleh digunakan untuk pembayaran transaksi objek haram dan maksiat, yaitu barang atau fasilitas yang dilarang dimanfaatkan atau digunakan menurut hukum Islam.

b. Pertumbuhan Ekonomi dalam Islam

Dalam kajian ekonomi Islam, persoalan pertumbuhan ekonomi telah menjadi perhatian para ahli dalam wacana pemikiran ekonomi Islam klasik. Pembahasan ini diantaranya berangkat dari firman Allah Swt. surat Hud ayat 61: *“Dia yang telah menjadikan kamu dari tanah dan menjadikan kamu pemakmurnya”*. Artinya, bahwa Allah Swt. menjadikan kita sebagai wakil untuk memakmurkan bumi. Terminologi ‘pemakmuran bumi’ ini mengandung pemahaman tentang pertumbuhan ekonomi, sebagaimana yang dikatakan Ali bin Abi Thalib kepada seorang gubernurnya di Mesir: *“Hendaklah kamu memperhatikan pemakmuran bumi dengan perhatian yang lebih besar dari pada orientasi pemungutan pajak, karena pajak sendiri hanya dapat dioptimalkan dengan pemakmuran bumi.*

Barang siapa yang memungut pajak tanpa memperhatikan pemakmuran bumi, negara tersebut akan hancur.”

Islam mendefinisikan pertumbuhan ekonomi sebagai perkembangan yang terus-menerus dari faktor produksi secara benar yang mampu memberikan kontribusi bagi kesejahteraan manusia. Dengan demikian, maka pertumbuhan ekonomi menurut Islam merupakan hal yang sarat nilai. Suatu peningkatan yang dialami oleh faktor produksi tidak dianggap sebagai pertumbuhan ekonomi jika produksi tersebut misalnya memasukkan barang-barang yang terbukti memberikan efek buruk dan membahayakan manusia.

Lebih dari itu, perubahan ekonomi merupakan aktivitas menyeluruh dalam bidang produksi yang berkaitan erat dengan keadilan distribusi. Pertumbuhan mencakup sisi yang lebih luas untuk pertumbuhan dan kemajuan aspek materil dan spiritual manusia. Dengan kata lain, pendekatan ini bukan hanya persoalan ekonomi kehidupan manusia saja, akan tetapi mencakup aspek hukum, sosial, politik dan budaya. Dalam pengertian ini, tujuan pertumbuhan ekonomi adalah untuk memajukan dasar-dasar keadilan sosial, kesamaan, Hak Asasi Manusia (HAM) dan martabat manusia.

Dengan demikian, pembangunan ekonomi menurut Islam bersifat multi dimensi yang mencakup aspek kuantitatif dan kualitatif. Tujuannya bukan semata-mata kesejahteraan material dunia, tetapi juga kesejahteraan akhirat. Keduanya menurut Islam menyatu secara integral.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah dilakukan dalam penelitian ini, maka dihasilkan kesimpulan sebagai berikut:

1. Jumlah kartu ATM / debit beredar tidak berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia dalam hal ini PDB pada periode tahun 2009-2017. Dalam penelitian ini menjelaskan bahwa apabila jumlah kartu ATM/ Debet beredar pada suatu negara meningkat, maka tidak berpengaruh terhadap menurunnya inflasi yang terjadi pada suatu negara tersebut. Jumlah kartu ATM/ Debet beredar meningkat hanya akan berpengaruh pada menurunnya jumlah uang beredar pada masyarakat.
2. Jumlah kartu kredit beredar tidak berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia dalam hal ini PDB pada periode tahun 2009-2017. Meningkatnya jumlah kartu kredit beredar hanya dapat menekan banyaknya jumlah uang kartal yang beredar pada

masyarakat. Secara teoritis, bertransaksi dengan uang giral maupun uang kartal, jumlah uang beredar akan tetap sama. Transaksi non tunai hanya akan berpengaruh terhadap kenyamanan dalam bertransaksi serta kurangnya biaya percetakan uang kartal.

3. Sistem pembayaran non tunai tidak berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi dalam hal ini PDB (Produk Domestik Bruto) melalui inflasi sebagai variable intervening pada periode 2009-2017. Berdasarkan pembuktian dari hasil penelitian menunjukkan bahwa peningkatan sistem pembayaran non tunai (APMK) bersama-sama hanya akan mengurangi porsi penggunaan uang tunai dalam mendukung aktifitas konsumsi masyarakat. Artinya apabila jumlah APMK (Alat Pembayaran Menggunakan Kartu) meningkat seperti ATM / debit dan kartu kredit maka akan mengurangi jumlah uang tunai yang beredar di masyarakat. Peningkatan APMK (Alat Pembayaran Menggunakan Kartu) tidak berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi.

4. Dalam perspektif syariah hukum uang elektronik adalah halal. Kehalalan ini berlandaskan kaidah; setiap transaksi dalam muamalah pada dasarnya diperbolehkan kecuali jika ada dalil yang mengharamkannya, maka saat itu hukumnya berubah menjadi haram. Adapun prinsip-prinsip syariah dalam transaksi uang elektronik yaitu; pertama tidak Mengandung Maysir (unsur perjudian, untung-untungan atau spekulatif yang tinggi). kedua, tidak Menimbulkan Riba. Ketiga,

Tidak Mendorong Israf (Pengeluaran yang Berlebihan). Ke empat,
Tidak Digunakan untuk Transaksi objek Haram dan Maksiat.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang telah dijelaskan sebelumnya, maka peneliti mencoba mengemukakan saran yang mungkin bermanfaat bagi pihak-pihak terkait.

1. Bagi pembuat kebijakan dalam hal ini Bank Indonesia

Perlunya peningkatan dalam hal sarana dan prasarana transaksi non tunai (APMK) mengingat potensi daripada pembayaran non tunai ini kedepannya semakin baik. Dengan sistem pembayan non tunai ini Bank Indonesia tentunya akan menciptakan masyarakat yang berkecenderungan non tunai, mengingat transaksi ini lebih efisien dan aman dalam penggunaannya. Cakupan ini harus merata tidak hanya di wilayah perkotaan, melainkan diperluas sampai ke pelosok pedesaan. Selain itu, Bank Indonesia harus mampu mengaplikasikan teknologi disertai fasilitas hukum yang baik.

2. Bagi Akademisi

Penelitian ini diharapkan mampu menjadi pemicu dan acuan bagi peneliti selanjutnya dengan tema serupa yang dapat dikembangkan dengan lebih baik. Sehingga penelitian ini tidak hanya terhenti sampai disini saja,

melainkan dapat dikembangkan secara berkesinambungan dan semakin lebih baik.



DAFTAR PUSTAKA

- Al-Badaa'i* vol. V, h. 274; *Bida'ayatul Mujtahid*, vol. II, *Haasyiyah ad-daasuuqii*, Vol. III, h. 47; *al-mughni* vol IV, *I'laamul muwaqqi'iin*, vol. I, H. 135 dalam Wahbah AzZuhaili, *Fiqh Islam wa adillatuhu*, Penerjemah Abdul hayyie Al-Kaffaani dkk, Cet. X, Jilid 5, Jakarta: Gema Insani, 2011
- Azharuddin Lathif, *Kontrak Bisnis Syariah*, Jakarta: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2011.
- Bank Indonesia, 2004. *Peraturan Bank Indonesia Tentang Penyelenggaraan Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu*.
- Bersama Uang Elektronik Ditinjau Dari Kesesuaian Prinsip-Prinsip Syariah, Jakarta: Bank Indonesia dan Dewan Syariah Nasional, 2016.
- Carl E Case dan Rey C Fair, *Prinsip-prinsip Ekonomi Jilid 2*, Diterjemahkan oleh Wibi Hardant, Jakarta : Erlangga, 2007.
- Chief Economist Samuel Sekuritas, Lana Soelistianingsih, "Jejak pertumbuhan ekonomi Indonesia". Online tersedia di: <http://www.kompas.com>, (26 November 2018)
- Enang Hidayat, *Fiqh Jual Beli*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya Offset, 2015 .
- Fatwa DSN-MUI No 28/DSN-MUI/III/2002 Tentang *Jual Beli Mata Uang (Al-Sharf)*
- Ferry Syarifuddin, Ahmad Hidayat, Tarsidin, *Dampak Peningkatan Pembayaran Non-Tunai Terhadap Perekonomian Dan Implikasinya Terhadap Pengendalian Moneter Di Indonesia*, Buletin Ekonomi Moneter dan Perbankan, April 2009.
- Habsari Candraditya, Idris, *Analisis Penggunaan Uang Elektronik*, Diponegoro Journal Of Management, Vol 2 No.3, Tahun 2013, Halaman 1-11.
- Ismail Fahmi Lubis, Analisis Hubungan Antara Inflasi Dan Pertumbuhan Ekonomi: Kasus Indonesia, *QE Journal*, Vol.03 - No.01 – 41.
- Jumlah mesin ATM beredar 2018. (on-line), tersedia di <https://tirto.id/suatu-saat-nasabah-bank-tak-butuh-lagi-mesin-atm-cLn4> (17 Mei 2019)

- Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, edisi empat, 2004.
- Kasmadi dan Nia Siti Sunariyah, *Panduan Modern Penelitian Kuantitatif*, Bandung: Alfabeta, 2014.
- Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2015.
- Laa Maisyir, *Inflasi Dalam Perspektif Islam*, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam UIN Alauddin Makassar, Volume 3, Nomor 1, Juni 2016: 41-58
- Laila Ramadani, *Pengaruh Penggunaan Kartu Debit dan Uang Elektronik (EMoney) Terhadap Pengeluaran Konsumsi Mahasiswa*, Fakultas Ekonomi Unversitas Negeri Malang, JESP-Vol. 8, No 1 Maret 2016. ISSN (P) 2086-1575 E-ISSN 2502-7115.
- Lasondy Istanto S, Syarief Fauzie, *Analisis Dampak Pembayaran Non Tunai Terhadap Jumlah Uang Beredar Di Indonesia*, Jurnal Ekonomi dan Keuangan Vol.2 No.10.
- M Nur Rianto Al Arif dan Euis Amalia, *Teori Mikroekonomi: Suatu Perbandingan Ekonomi Islam Dan Ekonomi Konvensional*, Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2014.
- Mohd Noor Omar, dkk, "E-Money in Malaysia: Shariah and Economic Analysis", *Working Paper In Islamic Economic And Finance*, No. 1224, Juli 2012
- Mughnil Al-Muhtaaj, Vol. II, H. 217, Dalam Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, penerjemah Abdul hayyie Al-Kaffaani dkk, Cet. X, Jilid 5 Jakarta: Gema Insani, 2011,
- Nelasari. R. P., & Cahyono, H. (2018). *Pengaruh Sistem Transaksi Non Tunai Terhadap Tingkat Konsumsi Masyarakat Di Surabaya*. Jurnal Ekonomi Islam, Vol. 1 No. 2, 2018, Hlm. 165-171.
- Nur Rianto Al Arif & Euis Amalia, *Teori Mikroekonomi: Suatu Perbandingan Ekonomi Islam Dan Ekonomi Konvensional* Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2014.
- Nur Rianto Al Arif, *Dasar-Dasar Ekonomi Islam*, Solo: Era Adicitra Intermedia, 2011.
- Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia, *Laporan Triwulan iv-2017*. Jakarta: 2017

Pratama Rahardja, Mandala Manurung, *Pengantar Ilmu Ekonomi (Mikroekonomi & Makroekonomi)*. Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 2008.

Pratama Rahardja, Mandala Manurung, *Teori Ekonomi Makro Suatu Pengantar Edisi Ketiga* Jakarta: FEUI, 2004.

Prof. Dr. Sugiyono, *Metode Penelitian Kombinasi Mixed Methods*. Bandung: Alfabeta, 2017.

Saifudin Azwar, *Metode Penelitian*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2001.

[Sakina Rakhma Diah Setiawan](http://www.kompas.com) “Ekonomi Indonesia 2017 Tumbuh 5,07 Persen, Tertinggi Sejak Tahun 2014”. (on-line), tersedia di: [Http://www.Kompas.com](http://www.kompas.com), (05 Februari 2018)

Solikin, Suseno, *Uang : Pengertian, Penciptaan, dan Perannya dalam Perekonomian*. Buku kebanksentralan No. 1, Jakarta: Pusat Pendidikan dan Studi Kebanksentralan, Bank Indonesia, 2002.

Sri Mulyani Tri Subari, Ascarya, *Kebijakan sistem Pembayaran di Indonesia*, Jakarta: Pusat Pendidikan dan Studi Kebanksentralan Bank Indonesia, 2003.

Stephen Rinaldy, *Ekonomi Islam/P3EI*, Jakarta: Rajawali Pers, 2013.

Sukirno, Sadono, *Ekonomi Pembangunan Edisi Kedua*. Jakarta: Kencana , 2006.

Sutan Remy Sjahdiyni, *Perbankan Islam dan Kedudukannya dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia* Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 1999.

Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Kedua, Jakarta: Perum Balai Pustaka, 1995.

Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam wa adillatuhu*, Penerjemah Abdul hayyie Al-Kaffaani dkk, Cet. X, Jilid 5, Jakarta: Gema Insani, 2011.

Wiratna Sujarweni, *Metodologi Penelitian Bisnis dan Ekonomi*, Yogyakarta: Pustaka Buana Press, 2015.

Yasin Ahmad Ibrahim, *Nazhariyyah Al-Gharar Fi Syariah Al-Islamiyyah* (dirasah muqaranah)

